

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR)**



**TESIS**

**Magister Ilmu Lingkungan**

**Ni Made Sunarti**

**L4K001106**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2002**

**TESIS**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN**  
**SAMPAH RUMAH TANGGA**  
**(STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR)**

Lokasi  
Di Kota Denpasar

Disusun Oleh :  
**Ni Made Sunarti**  
**NIM L4K001106**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 19 Oktober 2002  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

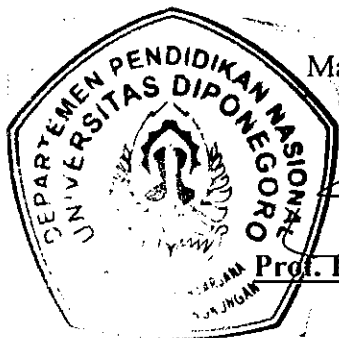
Pembimbing Utama


  
Dr. Ir. Purwanto, DEA

Pembimbing Kedua

  
Ir. Syafrudin, CES, MT

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Lingkungan



  
Prof. Dr. Sudharto P Hadi, MES  
NIP. 130810134

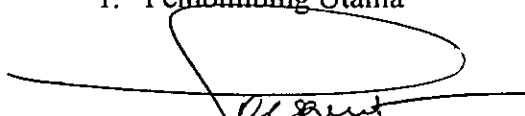
**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR)**

Nama Mahasiswa : Ni Made Sunarti  
Nomor Mahasiswa : L4K001106  
Program Studi : Magister Ilmu Lingkungan  
Konsentrasi : Perencanaan Lingkungan

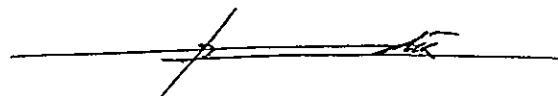
Tesis ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 19 Oktober 2002  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui


1. Pembimbing Utama

  
Dr. Ir. Rurwanto, DEA

2. Pembimbing Kedua

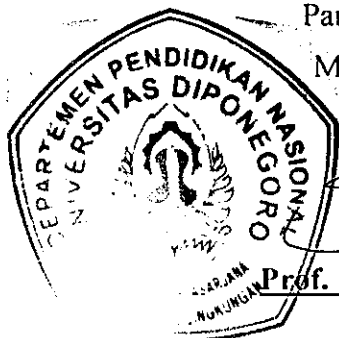
  
Ir. Syafrudin, CES, MT

3. Penguji

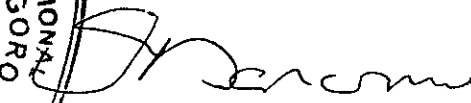
  
Prof. Dr. Sudharto P Hadi, MES

4. Penguji

  
Ir. Wahyu Krisna Hidajat, MT



Panitia Ujian Akhir Program  
Magister Ilmu Lingkungan  
Ketua

  
Prof. Dr. Sudharto P Hadi, MES  
NIP. 130810134

## RIWAYAT HIDUP

Ni Made Sunarti dilahirkan di Tabanan pada tahun 1968, merupakan putri kedua dari pasangan I Ketut Gelebugiartha dan Ni Nyoman Sukerti. Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Beraban pada tahun 1982, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 7 Denpasar tahun 1985, pendidikan Sekolah Menengah Atas (Sekolah Lanjutan Umum Tingkat Atas/SLUA) Saraswati I Denpasar tahun 1988, dan menyelesaikan pendidikan Strata 1 Jurusan Ekonomi Manajemen pada Universitas Warmadewa Denpasar tahun 1994. Pernah bekerja di perusahaan ekspedisi muatan kapal laut tahun 1988 sampai tahun 1989. Mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dari tahun 1995 sampai sekarang sebagai staf pada bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah kota Denpasar.

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, Oktober 2002

Ni Made Sunarti

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak-pihak baik yang berupa motivasi, bimbingan, masukan dan saran-saran. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro, Direktur Program Pasca Sarjana, Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Lingkungan beserta staf karena jabatannya telah memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti kuliah dan menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Ir. Purwanto, DEA sebagai pembimbing pertama dan Ir. Syafrudin, CES, MT sebagai pembimbing kedua yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing dengan teliti dan bijaksana dalam memberikan motivasi dan petunjuk yang berguna dalam penyelesaian tesis ini.
3. Para dosen dan rekan-rekan mahasiswa di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dorongan, bantuan dan kerja sama yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Pemerintah Daerah Propinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kota Denpasar yang telah memberikan bantuan dana dan izin belajar.
5. Ayah, Ibu, Mertua dan Suamiku tercinta I Nengah Sinarta, ST yang penuh kesabaran dan kesetiaan memberikan motivasi serta dorongan selama penulis kuliah pada Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.
6. Anakku tersayang I Wayan Danarsa Rekatmanta yang telah memberikan inspirasi dan toleransi

Penulis, Oktober 2002

## DAFTAR TABEL

|          |   | Halaman |
|----------|---|---------|
| Tabel 1  | Jumlah Penduduk dan Volume Sampah Rumah Tangga<br>Rata-rata Per hari di Kota Denpasar Tahun 1996-2000 ....  | 3       |
| Tabel 2  | Volume Sampah Yang Terangkut ke TPA .....   | 4       |
| Tabel 3  | Luas Wilayah dan Tingkat Kepadatan Penduduk<br>Dirinci Per Kecamatan (Dalam Km <sup>2</sup> ) Tahun 2000.....   | 54      |
| Tabel 4  | Perkembangan Sarana dan Prasarana Kebersihan<br>Di Kota Denpasar Tahun 1996-2000.....   | 60      |
| Tabel 5  | Kapasitas Truk Angkutan Sampah di Kota Denpasar .....   | 61      |
| Tabel 6  | Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat<br>Pendidikan .....   | 66      |
| Tabel 7  | Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat<br>Pendapatan .....   | 67      |
| Tabel 8  | Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan<br>Mengenai Peraturan Sampah dan Undang-Undang<br>Lingkungan Hidup.....   | 69      |
| Tabel 9  | Pengaruh Faktor Pendidikan, Pendapatan dan Pengetahuan<br>Mengenai Peraturan Sampah dan Undang-Undang<br>Lingkungan Hidup Terhadap Peningkatan Peran Serta<br>Masyarakat..... | 69      |
| Tabel 10 | Tingkat Kebersihan Lingkungan di Masing-masing Desa /<br>Kelurahan .....  | 73      |

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Tabel 11 | Tingkat Peranan Pemerintah Dalam<br>Pengelolaan Sampah .....                                  | 75 |
| Tabel 12 | Tingkat Peran Serta Masyarakat Mengikuti Program<br>Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah.....  | 78 |
| Tabel 13 | Tingkat Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan<br>Sampah Rumah Tangga .....                 | 82 |
| Tabel 14 | Pengaruh Peranan Pemerintah dan Masyarakat Terhadap<br>Penciptaan Kebersihan Lingkungan ..... | 84 |

## DAFTAR GAMBAR

|          | Halaman   |
|----------|---|
| Gambar 1 | Diagram Alur Pemikiran..... 39                                    |
| Gambar 2 | Skema Hubungan Antara Variabel Penelitian ..... 49                |
| Gambar 3 | Matrik Analisis SWOT ..... 87                                     |
| Gambar 4 | Model Pengelolaan Sampah Rumah Tangga<br>Di Kota Denpasar..... 88 |

## ABSTRACT

The Public Participation in Managing Domestic Wastes : A Case Study of Municipality of Denpasar was studied. The research problems are that the government has not been very successful in handling household garbage management in the city since not all this kind of garbage was able to be transported to the dumping area. Beside the society has not fully well manage their household garbage since many of them are still accustomed to throw away their garbage into river or in empty land. Therefore this research was aimed at analysing the government's efforts in handling household garbage management, and effort to enhance society's participation in handling this garbage.

Data collection techniques were questionnaire, interview and rapid appraisal strategi to key informants, covering society,s key persons and officials of clenliness and park office of Denpasar. Respondents were heads of familiy taken with purposive sampling technique. Data were analysed using frequency tables, regression analysisi and SWOT analysis. The research findings show that level of education has the strongest influence toward enhancement of sociaety,s participation and government's role, with the first as the most influencing factor.

It is recommended that society's knowledge on household garbage management should be intesively enhanced, to increase their awareness in keeping clean environment. Banjar should coordinadite the implementation. Desa adat (tradisional village) should be involved in monitoring and enhancing society's discipline. However, on the government limited capacity, household garbage handling should be self-managed by each village/kelurahan. Besides, the government should also self-improve itself by making better its service delevry format, infrasstructure, and also its human resource to make them well understand and well implement their duties. Efforts to enhance society's participation is through encouraging family participation in applying 4R (reduce, replace, reuse and recycle)

Keywords : Waste Management, Society Involvement, Government's Role, Enviromental Cleanliness.

## INTISARI

Penelitian mengenai Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Studi Kasus di Kota Denpasar telah dilakukan untuk mengkaji upaya pemerintah dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pemerintah dalam mengelola sampah rumah tangga belum berhasil dengan ditandai belum sepenuhnya sampah rumah tangga dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan masih kurangnya peran serta masyarakat dalam memperlakukan sampah rumah tangga. Masyarakat masih membuang sampah ke sungai dan pada lahan-lahan kosong sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Penelitian dilakukan di Kota Denpasar dengan sampel 6 (enam) desa/kelurahan yang menjadi juara dan dan yang tidak menjadi juara dengan skor terendah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara dengan tokoh masyarakat dan wawancara mendalam dengan pemegang informasi kunci (*key informan*). Responden penelitian dengan kuesioner adalah kepala keluarga dengan menggunakan *purposive sampling*. Analisis data menggunakan tabulasi frekuensi, analisis regresi dan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities dan Threats*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pendapatan dan pengetahuan tentang sampah dan undang-undang lingkungan hidup berpengaruh positif terhadap peningkatan peran serta masyarakat. Namun demikian faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pengetahuan masyarakat tentang peraturan sampah dan undang-undang lingkungan hidup. Pemerintah selama ini telah melaksanakan ke 5 aspek pengelolaan sampah, namun masih kurang dalam hal fungsi pelayanan termasuk aspek teknis operasionalnya yaitu kurangnya personil pelaksana pengelolaan sampah sebanyak 3.045 orang dan kurangnya sarana pengangkutan berupa truk sampah sebanyak 8 unit.

Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan adalah perlunya upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat secara luas dan terus dilakukan secara intensif sehingga betul-betul mampu membangkitkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pelaksanaannya dikoordinir dari tingkat banjar dengan pengawasan, pemeliharaan dan peningkatan kedisiplinan masyarakat perlu melibatkan desa adat. Mengingat kemampuan pemerintah sangat terbatas maka perlu diupayakan agar sistem pengelolaan sampah dilakukan secara swakelola oleh masing-masing desa/kelurahan. Pemerintah harus melakukan perbaikan secara internal dengan melakukan perbaikan format pelayanan, perbaikan sarana dan prasarana dan meningkatkan sumber daya manusia agar betul-betul memahami dan dapat melaksanakan bidang tugasnya dengan baik. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan meningkatkan peran serta keluarga untuk menerapkan pola 4 R (*Reduce, Replace, Reuse, dan Recycle*).

Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Peran Serta Masyarakat, Peranan Pemerintah, Kebersihan Lingkungan.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL                                |      |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                      | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                     | ii   |
| RIWAYAT HIDUP.....                           | iii  |
| PERNYATAAN.....                              | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                         | v    |
| DAFTAR TABEL .....                           | vi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                          | viii |
| ABSTRAK.....                                 | ix   |
| INTISARI.....                                | x    |
| DAFTAR ISI .....                             | xi   |
| I     PENDAHULUAN                            |      |
| 1.1 Latar Belakang .....                     | 1    |
| 1.2 Permasalahan .....                       | 6    |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                  | 7    |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                 | 7    |
| II    TINJAUAN PUSTAKA                       |      |
| 2.1 Pengertian Sampah .....                  | 8    |
| 2.2 Sumber Sampah .....                      | 8    |
| 2.3 Jenis-Jenis Sampah .....                 | 10   |
| 2.4 Jumlah Timbulan Sampah .....             | 11   |
| 2.5 Pengertian Pengelolaan Sampah .....      | 13   |
| 2.5.1 Manajemen Pengelolaan Sampah .....     | 14   |
| 2.5.1.1 Aspek Organisasi dan Manajemen ..... | 15   |
| 2.5.1.2 Aspek Pembiayaan .....               | 16   |
| 2.5.1.3 Aspek Pengaturan .....               | 17   |
| 2.5.1.4 Aspek Teknis .....                   | 18   |

|     |  |    |
|-----|--|----|
|     | 2.5.1.5 Aspek Peran Serta Masyarakat .....               | 18 |
|     | 2.5.2 Pola Pengelolaan Sampah Rumah Tangga .....         | 19 |
|     | 2.6 Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah .....      | 23 |
|     | 2.7 Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah..... | 24 |
|     | 2.7.1 Tingkat Pendidikan.....                            | 26 |
|     | 2.7.2 Pendapatan.....                                    | 30 |
|     | 2.7.3 Pengetahuan.....                                   | 32 |
|     | 2.8 Teori Perencanaan.....                               | 33 |
|     | 2.9 Kerangka Pemikiran .....                             | 37 |
|     | 2.10 Hipotesis .....                                     | 40 |
| III | METODOLOGI PENELITIAN                                    |    |
|     | 3.1 Lokasi Penelitian .....                              | 41 |
|     | 3.2 Jenis Penelitian.....                                | 41 |
|     | 3.3 Tipe Penelitian .....                                | 42 |
|     | 3.4 Sumber Data .....                                    | 42 |
|     | 3.5 Metode Pengumpulan Data .....                        | 43 |
|     | 3.6 Metode Analisis Data .....                           | 45 |
|     | 3.7 Tehnik Analisis Data.....                            | 47 |
|     | 3.8 Variabel Penelitian .....                            | 48 |
| IV  | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN                          |    |
|     | 4.1 Rona Lingkungan Daerah Penelitian .....              | 51 |
|     | 4.1.1 Letak Geografis .....                              | 51 |
|     | 4.1.2 Luas Wilayah Dan Keadaan Tanah .....               | 52 |
|     | 4.1.3 Iklim .....  | 53 |
|     | 4.1.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatan .....                | 53 |
|     | 4.2. Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah         |    |
|     | Rumah Tangga .....                                       | 58 |
|     | 4.2.1 Aspek Fisik.....                                   | 58 |
|     | 4.2.2 Aspek Non Fisik.....                               | 64 |

|   |    |
|---|----|
| 4.3 Peran Serta Masyarakat .....  | 65 |
| 4.2.1 Tingkat Pendidikan .....  | 66 |
| 4.2.2 Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga .....  | 67 |
| 4.2.3 Tingkat Pengetahuan Kepala Keluarga .....   | 69 |
| 4.4 Tingkat Kebersihan Lingkungan .....   | 72 |
| 4.4.1 Tingkat Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan<br>Sampah Rumah Tangga .....                     | 74 |
| 4.4.2 Tingkat Peran Serta Masyarakat Mengikuti Program<br>Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah ..... | 76 |
| 4.4.3 Tingkat Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan<br>Sampah Rumah Tangga .....                 | 80 |
| 4.5 Analisis Kondisi .....  | 86 |
| 4.6 Model Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar .....   | 88 |
| 4.7 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah<br>di Kota Denpasar .....                             | 91 |
| VI KESIMPULAN DAN SARAN   |    |
| 5.1 Kesimpulan .....  | 94 |
| 5.2 Saran .....   | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA  |    |
| LAMPIRAN  |    |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sampah perkotaan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapatkan porsi perencanaan dan perhatian serius serta sebanding dengan masalah lingkungan lainnya. Hal ini mengingat bahwa kenaikan volume sampah perkotaan dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan teknologi serta aktivitas sosial budaya dan ekonomi masyarakat (Delzell, et al dalam Outerbridge, 1991).

Sampah, umumnya merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kota-kota sedang dan besar di Indonesia, dan juga negara-negara sedang berkembang lainnya. Untuk mengurangi tumpukan sampah yang terus menggunung, telah dilakukan berbagai upaya pengelolaan sampah dengan metoda pengolahan paling sederhana yaitu dengan ditimbun atau dibakar hingga metoda pengolahan dengan teknologi tinggi yang relatif mahal. Dari sisi produsen sampah, baik sampah domestik, komersial, maupun industri, berbagai upaya untuk mengurangi volume sampah juga telah dilakukan, antara lain dengan menggunakan produk-produk yang dapat didaur ulang seperti kertas, karton dan sebagainya dan mengurangi penggunaan produk dari plastik yang relatif sulit untuk diurai secara alamiah, hingga rekayasa teknologi pemrosesan produk – produk industri

yang lebih sedikit menghasilkan limbah padat atau sampah (Anonim, 2002).

Banyaknya sampah yang sulit terurai, berarti juga memperluas lahan yang harus disediakan untuk penimbunannya. Sampah rumah tangga berupa gelas, plastik, logam seperti timah dan aluminium sulit terurai menjadi tanah apabila ditimbun, sedangkan plastik baru akan hancur secara alami jika tertimbun dalam tanah selama 240 tahun. Kaleng pengemas minuman, buah, daging dan sebagainya kalau dibuang ke lingkungan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai atau hancur kembali menjadi tanah. Kaleng dari timah atau besi memerlukan waktu 500 tahun untuk dapat menjadi tanah kembali dan yang paling lama adalah sampah berupa gelas atau kaca, yang menjadi hancur setelah satu juta tahun. (Tandjung, 1994).

Pengelolaan sampah khususnya di kota-kota besar merupakan salah satu kebutuhan pelayanan yang sangat penting dan perlu disediakan pemerintah. Jumlah penduduk kota yang relatif besar dengan kepadatan tinggi akan menghasilkan timbunan sampah yang besar yang harus ditanggulangi baik untuk kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup. Volume sampah ini akan meningkat sesuai laju pertumbuhan penduduk, peningkatan teknologi dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat (Slamet, 1994).

Pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar cukup tinggi karena Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Propinsi Bali, pusat perkantoran,

pusat pendidikan, pusat perekonomian dan merupakan salah satu tempat tujuan wisata sehingga berdampak terhadap peningkatan volume sampah, diantaranya adalah sampah rumah tangga.

Berikut disajikan data tentang jumlah penduduk dan volume sampah rumah tangga di Kota Denpasar dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 pada tabel 1.

Tabel. 1 Jumlah Penduduk dan Volume Sampah Rumah Tangga Rata-rata/ hari di Kota Denpasar Tahun 1996 – 2000.

| No | Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) | Volume sampah (m <sup>3</sup> )/hari |
|----|-------|------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 1996  | 371.424                | 599,040                              |
| 2  | 1997  | 373.272                | 612,480                              |
| 3  | 1998  | 382.555                | 790,400                              |
| 4  | 1999  | 390.230                | 832,000                              |
| 5  | 2000  | 522.381                | 960,000                              |

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar, 2000

Dari tabel 1 menunjukkan timbulan volume sampah cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya selaras dengan penambahan jumlah penduduk (DKP Kota Denpasar, 2000). Dari volume sampah tersebut tersebar di tiga Kecamatan dengan jumlah timbulan yang paling banyak adalah di Kecamatan Denpasar Barat 43,2 %, kemudian disusul berturut-turut oleh Kecamatan Denpasar Timur 30,3 % dan Denpasar Selatan 26,5 % (Rencana Strategis Kota Denpasar, 2000).

Volume sampah pada tabel 1 belum sepenuhnya dapat tersebut dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Data tentang volume sampah yang terangkut ke TPA dari tahun 1996-2000 disajikan pada tabel 2.

Tabel 2 Volume Sampah Rumah Tangga yang Terangkut ke TPA

| No | Tahun | Volume sampah<br>(m <sup>3</sup> )/hari | Yang<br>terangkut<br>(m <sup>3</sup> )/hari | Sisa<br>(m <sup>3</sup> )/hari | Prosentase<br>(%)<br>Sisa |
|----|-------|---|---|--------------------------------|---------------------------|
| 1  | 1996  | 599,04                                  | 509,18                                      | 89,86                          | 14,68                     |
| 2  | 1997  | 612,48                                  | 520,61                                      | 91,87                          | 14,28                     |
| 3  | 1998  | 790,40                                  | 671,84                                      | 118,56                         | 14,99                     |
| 4  | 1999  | 832,00                                  | 707,20                                      | 124,80                         | 15                        |
| 5  | 2000  | 960,00                                  | 816,00                                      | 144                            | 15                        |

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar, 2000

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa volume sampah belum sepenuhnya dapat terangkut ke TPA. Hal ini berarti bahwa akan terjadi peningkatan pembuangan liar yang cukup besar sehingga dikhawatirkan akan sulit untuk dikelola.

Kenyataan yang ada saat ini masih banyak masyarakat Kota Denpasar yang membuang sampah ke sungai, got atau selokan dan di lahan-lahan kosong, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran. Pembuangan sampah liar akan mengakibatkan sampah bisa membusuk, menimbulkan bau yang tidak sedap. Mikroorganisme tumbuh dengan subur pada sampah yang sedang membusuk, demikian juga halnya dengan lalat, lipas dan

serangga bersarang pada tumpukan sampah. Hal ini dapat menyebabkan berjangkitnya penyakit pada penduduk yang tinggal di sekitarnya.

Selain itu keindahan kota akan berkurang akibat adanya tumpukan sampah. Sampah yang dibuang ke selokan akan menyebabkan penyumbatan saluran, sehingga menimbulkan banjir dimusim hujan. Oleh karenanya sampah perlu dikelola dengan baik.

Pengelolaan sampah perkotaan di Kota Denpasar telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2000. Sampah yang dimaksud peraturan daerah ini adalah semua kotoran yang berasal dari kertas, daun-daun, kepingan kayu, botol dan barang-barang bekas lainnya yang bersifat merusak keindahan. Peraturan tersebut menekankan peningkatan peran serta masyarakat kota dalam pengelolaan sampah.

Peningkatan pengelolaan sampah di kota Denpasar ditempuh dengan dua strategi secara bersamaan, yaitu :

1. Usaha fisik berupa peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, sehingga diharapkan dapat menuntaskan pengangkutan seluruh sampah ke TPA yang telah ditentukan.
2. Usaha non fisik dengan peningkatan peran serta anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah secara utuh baik dari segi operasional maupun pembiayaan.

Namun demikian masalah penganggulan sampah secara non fisik yaitu menanggulangi timbulnya sampah secara umum lebih sulit daripada menanggulangi timbulnya sampah dengan cara fisik. Pemecahan masalah non fisik yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar adalah dilakukan dengan cara memberdayakan peran serta masyarakat dengan mengadakan, penyuluhan, lomba kebersihan, penarikan retribusi, menerbitkan peraturan daerah, walaupun nampak belum berhasil . Usaha kebersihan lingkungan selain menjadi tanggungjawab Pemerintah juga menjadi tanggungjawab semua pihak terutama masyarakat (Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 1997). Masyarakat sebagai penghasil/sumber timbulan sampah berkewajiban mengelola sampah yang ditimbulkannya agar tidak mencemari lingkungannya secara proaktif.

Dalam pengelolaan sampah diperlukan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain tingkat pendidikan, pendapatan dan pengetahuan. Tanpa adanya peran serta masyarakat program persampahan tidak akan berhasil pengelolaannya. (Barlian, 2000).

## **1.2 Permasalahan**

1. Masih terdapat sebagian besar sampah rumah tangga belum terangkut ke TPA.

2. Masih kurangnya peran serta masyarakat di dalam memperlakukan sampah rumah tangga dengan adanya pembuangan sampah ke sungai dan pada lahan-lahan kosong. Kondisi ini dapat dilihat pada lampiran 5.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dikota Denpasar.
2. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di kota Denpasar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi perkembangan ilmu dari aspek pendidikan hasil penelitian ini yang tersaji dalam format ilmiah diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang lingkungan.
2. Sebagai suatu rujukan kajian evaluasi terhadap kebijakan dalam pengelolaan sampah bagi pemerintah kota Denpasar.
3. Rujukan informasi pengelolaan sampah kota Denpasar yang dapat digunakan untuk perencanaan pengambilan keputusan atau menentukan kebijakan dalam pengelolaan sampah kota bagi pemerintah kota Denpasar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Sampah**

Pengertian sampah menurut Slamet (1994) adalah sesuatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat, baik berupa bahan buangan yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Apriadji, (2000) menjelaskan bahwa sampah adalah zat-zat atau benda-benda yang tidak dipakai lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga maupun dari pabrik sebagai sisa proses industri.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dipahami sampah adalah :

- Sesuatu yang harus dibuang.
- Adanya hubungan dengan aktivitas manusia baik dari rumah tangga maupun pabrik.
- Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi dan tidak disenangi.
- Sisa proses industri.

#### **2.2 Sumber sampah**

Sumber sampah berasal dari semua tempat yang ada di permukaan bumi. Seluruh daratan yang ada di permukaan bumi sangat potensial untuk memunculkan sampah. Setiap aktifitas manusia dilaksanakan

sampah niscaya akan timbul secara umum dikenal beberapa sumber sampah. (Pusdiknakes, 1987)

a. Sampah dari permukiman penduduk.

Pada suatu permukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga atau beberapa keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu, plastik dan lainnya.

b. Sampah Dari Tempat-tempat Umum dan Perdagangan

Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

c. Sampah Dari Sarana Pelayanan Masyarakat Milik Pemerintah

Yang dimaksud di sini misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya menghasilkan sampah kering dan sampah basah.

d. Sampah Dari Industri

Dalam pengertian ini termasuk pabrik-pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain-lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang

dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, sisa bahan bangunan, sampah khusus dan kadang-kadang termasuk sampah berbahaya.

e. Sampah Pertanian

Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber-sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah.

### 2.3 Jenis-Jenis Sampah

Sampah yang dihasilkan oleh penghasil / penimbun sampah dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis (Apriadi, 2000)

a. Sampah Lapuk (*garbage*)

Sampah golongan ini merupakan sisa-sisa pengolahan atau sisa-sisa makanan dari rumah tangga atau merupakan timbulan hasil sisa makanan, seperti pasar sayur mayur. Contoh sampah lapuk adalah potongan-potongan sayuran yang merupakan sisa-sisa sortasi sayur mayur di pasar, makanan sisa, kulit pisang, daun pembungkus dan sebagainya.

b. Sampah tak lapuk (*garbage*) dan sampah tak mudah lapuk (*rubbish*)

Sampah golongan ini memang dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis :

- Golongan pertama sampah tak lapuk. Sampah jenis ini benar-benar tak akan bisa lapuk secara alami, sekalipun telah memakan waktu bertahun-tahun. Contohnya kaca dan mika.
- Golongan kedua sampah tak mudah lapuk. Sekalipun sulit lapuk, sampah jenis ini akan bisa lapuk perlahan-lahan secara alami. Sampah jenis ini masih bisa dipisahkan lagi atas sampah tak mudah lapuk yang bisa terbakar, seperti kertas dan kayu, dan sampah tak mudah lapuk yang tidak bisa terbakar, seperti kaleng dan kawat.

## 2.4 Jumlah Timbulan Sampah

Karakteristik timbulan sampah permukiman baik kuantitas maupun kualitasnya, sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakatnya. Beberapa faktor yang penting antara lain adalah (Slamet, 1994)

a. Jumlah Penduduk

Dapat dipahami dengan mudah bahwa semakin banyak penduduk, semakin banyak pula sampahnya. Pengelolaan sampah inipun berpacu dengan laju pertumbuhan penduduk.

b. Keadaan Sosial Ekonomi

Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat semakin banyak jumlah per kapita sampah yang dibuang dan kualitas

sampahnya semakin tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan.

Kenaikan kesejahteraan inipun akan meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan bangunan-bangunan, transportasi, dan produk pertanian, industri dan lain-lain, dengan konsekuensi bertambahnya volume dan jenis sampah.

### c. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula.

Permasalahan sampah secara umum memerlukan perhatian dari segenap pihak. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin lama semakin besar sedangkan ruang atau tempat untuk mengelola sampah semakin sedikit. Berbagai aktivitas kehidupan manusia banyak menimbulkan timbulan sampah.

Bila pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan benar dan atau tidak dikelola maka akan dapat menyebabkan masalah :

- Proses pembentukan lindi (*leachet*) pada pembusukan sampah yang bila mengalir pada sumber air permukaan akan mencemari sumber air tersebut.
- Pembusukan sampah akan menimbulkan bau yang dapat mencemari udara.

- Sampah organik maupun anorganik yang tidak dikelola akan menimbulkan sarang / bibit penyakit.
- Tumpukan sampah baik kering maupun basah akan mudah terbakar sehingga berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran.
- Secara umum, sampah membutuhkan areal yang luas untuk pembuangannya. Hal ini menjadi masalah yang serius bagi daerah perkotaan yang luas lahannya terbatas.
- Jumlah sampah yang besar dan keragaman yang tinggi akan menyulitkan dalam penanganannya.
- Fasilitas, sarana dan biaya operasional penanggulangan sampah masih belum memadai dan tidak sebanding dengan peningkatan volume sampah. Keadaan ini memberikan peluang untuk terjadinya pencemaran (Gumbira, 1987)

Berbagai permasalahan tentang sampah ini muncul karena aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika hal ini dibiarkan maka sampah yang ada baik organik maupun anorganik akan potensial untuk menimbulkan pencemaran. Pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dapat berupa pencemaran udara, air atau pencemaran terhadap tanah yang ada disekitarnya yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Untuk menghindari hal tersebut maka sampah perlu dikelola dengan baik.

## **2.5 Pengertian Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah sering diartikan sebagai suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan,

pengumpulan, pemindahan / pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terbaik dari kesehatan dan pertimbangan – pertimbangan lainnya dan juga memperhatikan sikap masyarakat (Departemen Kesehatan, 1987)

Upaya pengelolaan sampah perlu didasarkan atas berbagai pertimbangan antara lain : (1) untuk mencegah terjadinya penyakit, (2) konservasi sumberdaya alam, (3) mencegah gangguan estetika, (4) memberi insentif atau daur ulang dan (5) kuantitas dan kualitas sampah akan meningkat (Slamet, 1994).

Upaya pengelolaan sampah dimaksudkan disini merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melakukan penanganan terhadap sampah agar tidak mencemari lingkungan sehingga lingkungan masih tetap terpelihara agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi sebaik-baiknya.

### 2.5.1 Manajemen Pengelolaan Sampah

Manajemen sampah perkotaan pada dasarnya dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih, sehat dan teratur (Syafudin, Priyambada, 2001). Komponen-komponen itu adalah :

#### 2.5.1.1 Aspek Organisasi dan Manajemen

Aspek organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang

menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya dan kondisi fisik wilayah kota dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat. Bentuk institusi pengelolaan persampahan yang dianut di Indonesia adalah :

- a. Seksi kebersihan di bawah dinas, terutama apabila masalah kebersihan kota masih bisa ditanggulangi oleh suatu seksi dibawah dinas tersebut.
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibawah suatu dinas terutama dinas yang mengelola struktur organisasi belum ada khusus dibawah dinas yang mengelola kebersihan, sehingga lebih memberikan tekanan pada masalah operasional dan lebih mempunyai otonomi daripada seksi.
- c. Dinas Kebersihan akan memberikan percepatan dan pelayanan pada masyarakat. Dinas ini perlu dibentuk karena aktivitas dan volume pekerjaan yang sudah meningkat.
- d. Perusahaan Daerah Kebersihan merupakan suatu organisasi pengelolaan yang dibentuk bila permasalahan di kota tersebut sudah cukup luas dan kompleks. Pada prinsipnya perusahaan daerah ini tidak lagi disubsidi oleh pemerintah daerah, sehingga efektifitas penarikan retribusi akan lebih menentukan.

Adapun bentuk kelembagaan yang dianjurkan untuk berbagai kategori kota adalah sebagai berikut : (1) untuk kota raya dan kota besar (> 1.000.000 jiwa) adalah perusahaan daerah atau dinas tersendiri, untuk

kota sedang 1 (250.000 – 500.000 jiwa) adalah dinas tersendiri dan untuk kota sedang 2 (100.000 – 250.000 jiwa) adalah dinas atau UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas).

#### 2.5.1.2 Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan merupakan sumberdaya penggerak agar pada roda sistem pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Sektor pembiayaan ini menyangkut beberapa aspek seperti :

- a. Bagaimana proporsi APBN dan anggaran pengelolaan persampahan antara retribusi dan biaya pengelola sampah.
- b. Bagaimana proporsi komponen biaya tersebut untuk gaji, transportasi, pemeliharaan, pendidikan dan pengembangan serta administrasi.
- c. Bagaimana proporsi antar retribusi dengan pendapatan masyarakat.
- d. Bagaimana struktur penarikan yang berlaku.

Dana untuk pengelolaan persampahan/kebersihan suatu kota sebesar 5 – 10 % dari APBD. Diusahakan agar biaya pengelolaan sampah dapat diperoleh dari masyarakat  $\pm$  80 % dan dari Pemerintah Daerah menyediakan  $\pm$  20 % untuk pelayanan umum antara lain penyapuan jalan, pembersihan saluran dan tempat-tempat umum. Besarnya retribusi yang layak ditarik dari masyarakat adalah  $\pm$  1 % dari penghasilan per rumah tangga.

Retribusi persampahan merupakan bentuk konkret partisipasi masyarakat dalam membiayai program pengelolaan persampahan. Bentuk penarikan retribusi dibenarkan bila pelaksanaannya adalah badan formal yang diberi kewenangan oleh pemerintah.

#### 2.5.1.3 Aspek Peraturan

Aspek pengaturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan membutuhkan kekuatan-kekuatan dan dasar hukum seperti pembentukan organisasi, pemungutan retribusi dan ketertiban masyarakat.

Peraturan perundang-undangan tentang sampah harus mengatur bagaimana sampah harus dikelola, baik oleh masyarakat secara perorangan atau secara bersama, maupun oleh pemerintah sendiri.

Salah satu kiat dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat suatu kebijakan dalam suatu bentuk peraturan pemerintah yang diharapkan dapat dijadikan acuan yang jelas bagi para pelaku-pelaku yang berbasis langsung dengan lingkungan hidup, untuk mengetahui batas-batas dan aturan-aturan yang sewajarnya harus dipatuhi (Djarmiko,dkk, 2000).

Dalam hubungannya dengan perilaku membuang sampah, sosialisasi peraturan daerah sebelumnya merupakan rangsangan bagi terbentuknya perilaku membuang sampah yang benar. Disamping itu tentu peraturan perundang-undangan tentang sampah harus memberikan

dasar hukum terhadap tindakan atau sanksi yang dapat dilakukan dan diambil terhadap setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut.

Hukum ini mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberi sanksi yang tegas (berupa hukum) terhadap yang tidak mau patuh mentaatinya. (Rahardjo, 2000).

#### 2.5.1.4 Aspek Teknis

Teknis pemrosesan dalam pengelolaan sampah digunakan untuk memperbaiki sistem efisiensi operasi dan memanfaatkan sumberdaya atau bahan-bahan yang dapat dipakai. Teknik pembuangan sampah dapat dilihat mulai dari sumber sampah sampai pada tempat pembuangan akhir. Perbandingan jumlah personil pengelola terhadap penduduk yaitu pada tahap pengumpulan minimum 1:1000 penduduk, pada tahap pengangkutan dan pembuangan akhir 1:1000 penduduk.

#### 2.5.1.5 Aspek Peran Serta Masyarakat

Untuk dapat membantu program pemerintah dalam pengelolaan sampah salah satu pendekatan yang dapat dilakukan yaitu dengan pendekatan kepada masyarakat dengan membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program. Hal ini menyangkut bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, faktor-faktor sosial

dan budaya setempat serta kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini. Masalah yang dijumpai di Indonesia pada umumnya adalah :

- a. Tingkat pendidikan penduduk yang tidak merata, sehingga tingkat pemahaman terhadap program pembangunan yang memerlukan partisipasi masyarakat yang kurang efektif.
- b. Masih belum melembaga keinginan untuk menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing
- c. Belum ada pola baku bagi pembinaan masyarakat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya
- d. Masih banyak pengelola kebersihan yang memang belum mencatumkan program penyuluhan sebagai salah satu aktivitasnya
- e. Kadangkala ada kecurigaan pihak pengelola kebersihan bila terdapat inisiatif dari masyarakat dalam usaha-usaha penanganan sampah dengan kekhawatiran bahwa usaha tersebut tidak segaris dengan konsep pengelolaan yang ada.

#### 2.5.2 Pola Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Di negara-negara maju, upaya untuk mengurangi jumlah sampah adalah dengan menerapkan 4 R (*Reduce, Replace, Reuse dan Recover*)

*Reduce* : Berarti perilaku mengurangi konsumsi atau menggunakan sesuatu misalnya mengurangi konsumsi plastik, mengurangi menggunakan kendaraan pribadi.

*Replace* : Mengganti sesuatu sebagai alternatif yang lebih akrab lingkungan dan tidak membahayakan bagi kesehatan.

*Reuse* : Menggunakan sesuatu yang bisa digunakan lagi dan menjauhkan perilaku habis buang.

*Recycle* : Mendaur ulang lebih baik dibanding membuang artinya memanfaatkan sesuatu untuk keperluan lain yang lebih berguna (Hadi, 2000)

Agar sampah tidak membahayakan maka perlu pengaturan dimasing-masing rumah tangga (Sukarni, 1994). Adapun cara pengaturannya yaitu :

a. Pewadahan

Pewadahan sampah diperlukan tempat tempat sampah di tiap rumah isinya cukup satu meter kubik.

Tempat sampah harus :

- Terbuat dari bahan mudah dibersihkan dan tidak mudah terbakar
- Harus tertutup rapat
- Ditempatkan diluar rumah

b. Pengumpulan

Pengumpulan sampah dapat dilakukan secara perseorangan yaitu sampah dikumpulkan oleh keluarga di tempat tertentu yang selanjutnya diangkat oleh petugas menuju TPS atau TPA.

c. Pembuangan dapat dilakukan dengan cara

- *Individual incineration* yaitu sampah dikumpulkan di lubang sampah kemudian dibakar di pekarangan masing-masing.

- *Open dumping* adalah pembuangan sampah dengan meletakkan begitu saja diatas tanah.
- *Controlled Land fill* yaitu sampah dibuang di tempat yang rendah, kemudian dirug supaya tidak dikorek oleh anjing atau kucing.
- *Sanitary Land fill* yaitu cara pembuangan sampah ke dalam tanah dengan pelapisan. Sampah yang dibuang diratakan diatas tanah rendah atau miring kemudian dilapisi dengan tanah sehingga sampah tidak lagi terbuka.

Sistem pengolahan sampah rumah tangga yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Bandar Lampung berbasis pada masyarakat (Anonim, 2002). Adapun sistem pengolahannya sebagai berikut :

- Setiap rumah tangga memisahkan sampah mereka kedalam tiga tempat (tong sampah). Masing-masing tempat sampah tersebut berturut-turut akan diisi oleh sampah organik, sampah anorganik yang dapat didaur ulang (seperti gelas, plastik, besi kertas dan sebagainya) dan sampah anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan.
- Setiap rumah tangga diorganisir kedalam kelompok-kelompok kecil di tingkat RT. Dalam setiap kelompok ini terdapat beberapa anggota masyarakat yang bertanggungjawab dalam mengelola sampah dalam kelompoknya masing-masing yang meliputi pengumpulan sampah, yang telah dipilah dari setiap rumah tangga ke tempat penampungan sementara, untuk selanjutnya diangkut ke TPA.

- Di tempat penampungan sampah sementara ini, sampah organik akan diproses menjadi kompos untuk dimanfaatkan dalam urban agriculture, sedangkan sampah anorganik akan di daur ulang menjadi produk-produk yang dimanfaatkan kembali dan sampah anorganik sisanya dibuang ke TPA.

Dengan sistem pengelolaan ini, dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah antara lain :

- Bagi pemerintah, sistem ini akan mengurangi beban pengelolaan sampah hingga 50 % sampah organik dan 10 % sampah anorganik.
- Bagi masyarakat, produk kompos dapat dimanfaatkan untuk bertanam sayur mayur di halaman rumah mereka masing-masing secara gratis, sedangkan hasil daur ulang sampah anorganik setempat selain untuk membiayai ongkos pengangkutan dari rumah tangga sampai ke tempat penampungan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir.
- Dari segi kelestarian lingkungan dengan terkelolanya sampah, khususnya sampah rumah tangga, lingkungan akan menjadi lebih bersih dan sehat.

Menurut Slamet (1994) usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam mengurangi sampah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya yaitu dengan meningkatkan pemeliharaan dan kualitas barang sehingga tidak cepat menjadi sampah, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan meningkatkan penggunaan bahan yang dapat terurai secara alamiah,

misalnya pembungkus plastik diganti dengan pembungkus kertas. Semua usaha ini memerlukan kesadaran masyarakat serta peran sertanya.

## **2.6 Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan tentang pengendalian bagaimana sampah dihasilkan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah dengan menggunakan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat, teknik pelestarian lingkungan, keindahan dan dengan tanggungjawab dan sikap masyarakat sehingga tercipta kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan suatu ukuran keadaan lingkungan yang tidak menimbulkan gangguan yang diakibatkan oleh sampah. (Sudarso, 1985)

Pengelolaan sampah merupakan salah satu unsur pelayanan yang menjadi tugas pemerintah kota. Masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan, maka mereka perlu dilibatkan atau diikutsertakan dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan, terutama dalam kebersihan lingkungan. Peran serta ini juga sangat diperlukan mengingat bahwa kemampuan pemerintah kota dalam menyediakan fasilitas pelayanan masih sangat terbatas.

Apapun usaha pengelolaan sampah, baik skala besar maupun skala kecil, bila harus mencapai tujuannya, yakni kebersihan lingkungan dan masyarakat yang sehat, maka faktor yang paling utama yang harus diperhatikan adalah peran serta masyarakat. Masyarakat harus mengerti dan mau berpartisipasi bila perlu juga merubah sikap sehingga bersedia

membantu mulai dari pengurangan volume sampah, perbaikan kualitas sampah, sampai pada penyediaan lahan dan pemusnahan sampah. Tanpa partisipasi masyarakat, program persampahan tidak akan tuntas pengelolaannya (Slamet, 1994). Jelaslah bahwa usaha-usaha pemerintah sangat penting untuk mendorong menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

## **2.7 Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah**

Istilah peran serta sering disebut juga partisipasi. Partisipasi tersebut secara umum mempunyai pengertian sebagai salah satu usaha berkelanjutan, yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan, baik secara aktif maupun pasif. Partisipasi tersebut dapat dimanfaatkan pula sebagai sarana mengkomunikasikan keinginan masyarakat untuk ikut melakukan kontrol terhadap kegiatan pembangunan (Anonymous, 1999).

Menurut Hadi (1995) dari segi kualitas, partisipasi atau peran serta masyarakat penting sebagai : (1) input atau masukan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan, (2) strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat sehingga kredibilitas keputusan akan sah, (3) komunikasi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi dan *concern* masyarakat, (4) media pemecahan masalah untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan konflik untuk memperoleh konsensus, (5) terapi sosial untuk

menyembuhkan penyakit sosial seperti rasa keterasingan dan rasa kurang percaya diri.

Pada prinsipnya terdapat dua alasan dasar dan rasional untuk penyelenggaraan proses peran serta yaitu alasan etnis dan pragmatis. Alasan etnis lebih menekankan pada kesempatan yang diberikan kepada masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap lingkungannya untuk dimintai pendapat dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan alasan pragmatis bahwa dukungan terhadap program-program dan kebijaksanaan-kebijaksanaan seringkali tergantung pada keinginan dan kepedulian masyarakat untuk membantu melaksanakannya. (Anonymous, 1999)

Selanjutnya dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yaitu pada Bab II pasal 5 ayat 1 bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa peran serta dapat diartikan sebagai keterlibatan individu didalam kegiatan dirinya, dan keterlibatan individu didalam kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini peran serta dapat diwujudkan dalam sumbangan sukarela, aktivitas seseorang, baik ide rasa kebersamaan tanggungjawab maupun tindakan-tindakan yang lahiriah maupun aktivitas jasmani kepada kelompok untuk keberhasilan tujuan kelompok tersebut.

UPT-POSTAK-UNMP

Beberapa kelompok dibentuk dengan kemampuan untuk beraksi secara berkesinambungan. Beberapa bentuk aksi yaitu bertukar pengalaman. Wadah organisasi masyarakat memudahkan koordinasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. (Soerjani, 1999)

Peran serta masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu tingkat pendidikan, pendapatan dan pengetahuan (Barlian, 2000)

### 2.7.1 Tingkat Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu sub sistem dari sistem sosial yang terorganisir dan berusaha mengembangkan kemampuan, sikap, nilai dan pengetahuan para warga negara menuju terbinanya warga negara yang dewasa, baik secara ekonomi, kultural, religius maupun etis sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan. (Barlian, 2000)

Swift (1989) berpendapat bahwa pendidikan adalah sesuatu yang terjadi di masyarakat dan merupakan proses atau cara memperoleh dan menghasilkan kemampuan fisik, moral dan sosial yang dituntut daripadanya oleh kelompok tempatnya dilahirkan dan dibesarkan dan harus berfungsi sebagai proses sosialisasi.

Durkheim dan Said (1989) berpendapat bahwa pendidikan adalah pengaruh yang dilaksanakan oleh orang dewasa atas generasi yang belum matang untuk penghidupan sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan mengembangkan keadaan fisik, intelektual dan kesusilaan tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat politis dalam kesatuannya, juga oleh lingkungan khusus yang tertentu baginya.

Tujuan pendidikan menurut Brubacher (1962) dalam Hartoko (1985), bukan semata-mata mengalihkan pengetahuan, melainkan membantu agar peserta didik (manusia atau masyarakat luas) mampu mengembangkan potensi-potensinya untuk tahu lebih banyak belajar dan terus dalam arti seluas mungkin. Potensi tersebut merupakan daya dasariah manusia, lingkungan hidupnya dan tuhaninya. Jika manusia dapat mengetahui dirinya dalam konteks seluas selengkap itu, maka ia dapat mandiri dalam relasi dengan yang lainnya, sehingga dapat menjadi manusia yang sebenar-benarnya.

Hasil KTT Bumi di Rio Janeiro bulan Juni 1992 menegaskan bahwa pendidikan dapat menimbulkan kesadaran, nilai dan sikap, kecakapan dan perilaku menyangkut etika dan lingkungannya yang sangat diperlukan menyangkut untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, pendidikan perlu menjelaskan, bukan saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan sosial ekonomi dan perkembangan manusia untuk meningkatkan pendidikan tentang pembangunan berkelanjutan bangsa-bangsa di dunia perlu berupaya untuk :

- (1) menyediakan pendidikan tentang pembangunan dan lingkungan bagi orang-orang segala kelompok umur, (2) memasukkan konsep-konsep lingkungan dan pembangunan, termasuk tentang kependudukan kedalam semua program pendidikan, (3) mendorong semua komponen masyarakat termasuk industri, perguruan tinggi, pemerintah, LSM dan organisasi

sosial kemasyarakatan agar melatih orang-orang ke dalam pengelolaan lingkungan hidup. (Keating, 1994)

Sunyoto dalam Rahardjo (1988) menyatakan bahwa pendidikan mengandung makna sebagai usaha membangun pribadi warga negara dan bangsa. Melalui pendidikan dan dengan pendidikan, kepribadian yang harmonis dipupuk dan dikembangkan. Setiap orang diharapkan setahap demi setahap mengatur kehidupan dirinya, mengatasi persoalannya, mencukupi kebutuhannya, serta mengendalikan dan mengarahkan kehidupannya. Bahkan dengan pendidikan, setiap orang diharapkan dapat memberikan jasa-jasanya bagi orang lain, bagi masyarakat dan bangsanya, sesuai dengan keadaan dan kemampuannya.

Lebih lanjut Sunyoto dalam Rahardjo (1988) menyimpulkan bahwa pendidikan dengan demikian memiliki dimensi-dimensi yang makin luas dan makin bertambah banyak. Dimensi psikologis, filosofis agamis, sosiologis, ekonomis, politis membentuk wajah pendidikan berbeda-beda dari masa ke masa. Pendidikan tidak lagi sekedar pembinaan kepribadian seseorang dengan pedoman norma yang telah ditentukan, melainkan meliputi usaha merealisasikan kepentingan-kepentingan sosial ekonomi dan politik. Pendidikan membawa misi mengarahkan perubahan sistem sosial budaya yang dicita-citakan masyarakat, dan meningkatkan peran serta sosial kemasyarakatan lainnya.

Gazalba (1989) menyatakan bahwa pendidikan pertama dan utama warga masyarakat didapatkan dari lingkungan keluarga sebagai anggota keluarga. Dalam pendidikan rumah tanggalah dimulai sosialisasi dan enkultuasi calon-calon anggota masyarakat. Pendidikan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging membentuk tabiat membentuk sikap mental. Sikap mental ini akan menentukan kepribadian, kepribadian akan melahirkan kemauan. Kemauan menggerakkan laku perbuatan sejenis dengan apa yang dididik. Dengan demikian sikap mental, jenis kemauan dan laku perbuatan warga masyarakat dipersiapkan oleh pendidikan keluarga.

Berdasarkan pendapat diatas, keluarga sebagai institusi sosial, bukan hanya sebagai sebuah kelompok, tetapi lebih dari itu, ia dapat berfungsi merangkai pola-pola tingkah laku yang mencerminkan identitas setempat dan juga dalam hubungannya dengan institusi diluar keluarga. Dengan demikian, lingkungan keluarga merupakan media yang sesuai bagi upaya penanaman etika lingkungan, karena didalamnya secara rutin terjadi proses sosialisasi etika dan moralitas kehidupan. Sosialisasi dan proses penyadaran dalam skala keluarga akan arti pentingnya lingkungan hidup perlu diupayakan terus, sehingga muncul kesadaran pribadi.

Pada gilirannya, kesadaran tersebut akan melahirkan rasa tanggungjawab dan pengabdian terhadap keberadaan dan kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian integral dari kehidupan umat manusia.

### 2.7.2 Pendapatan

Pendapatan merupakan unsur penting bagi setiap orang karena dengan adanya penghasilan manusia mampu meningkatkan kesejahteraannya. Dengan pendapatan yang relatif tinggi seseorang tidak hanya memikirkan bagaimana upaya memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang layak, tetapi lebih dari itu dapat membagi dan menyisihkannya untuk kebutuhan hidup yang lainnya. (Barlian, 2000)

Abdulrachman (1976) mengemukakan bahwa pendapatan adalah sesuatu yang dapat berupa uang atau keuntungan material lainnya yang timbul dari kekayaan atau dari jasa-jasa yang dilakukan oleh umat manusia secara bebas.

Menurut Winardi (1983) tingkat pendapatan adalah tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh seseorang atau suatu keluarga yang didasarkan atas penghasilan mereka atau sumber-sumber pendapatan lainnya. Tingkat pendapatan ini meliputi : (1) tingkat subsistensi atau tingkat rendah yakni seseorang hanya mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi kehidupan yang layak, (2) standar minimum kesehatan atau tingkat sedang, yakni selain memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi kehidupan yang layak, juga telah memperhatikan kesehatan, (3) standar confort atau tingkat tinggi, yakni tidak hanya hidup layak, tetapi juga telah memperhatikan kesehatan dan menikmati kesenangan-kesenangan hidup lainnya.

Pendapatan seseorang atau kelompok masyarakat yang relatif tinggi, akan memungkinkan seseorang tidak hanya memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang layak. Dengan tingkat pendapatan yang relatif tinggi, masyarakat dapat membagi dan menyisihkannya untuk kebutuhan hidup yang lain, baik untuk menjaga, merawat dan memelihara kesehatan badannya, maupun yang lainnya termasuk didalamnya menjaga dan memelihara kesehatan lingkungannya seperti menyediakan sarana prasarana untuk menampung dan mengelola sampah rumah tangganya, agar tidak berserakan atau tercecer di sembarang tempat di lingkungan rumah tangganya atau di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dengan pendapatan yang relatif tinggi seseorang tidak hanya memikirkan bagaimana upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang layak, tetapi lebih dari itu dapat membagi dan menyisihkan untuk kebutuhan hidup yang lainnya.

### 2.7.3 Pengetahuan

Dengan pengetahuan yang telah dimiliki seseorang maka akan terbentuk gagasan yang melahirkan pandangan atau persepsi sikap terhadap objek sikap dalam hal ini usaha pengelolaan sampah.

Menurut Sastropetro (1998) faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat terdiri dari 3 hal yaitu (1) keadaan sosial masyarakat, (2) kegiatan program pembangunan dan (3) keadaan alam sekitar. Keadaan sosial masyarakat meliputi : pendidikan, tingkat pendapatan, kebiasaan dan kedudukan sosial dalam sistem sosial. Kegiatan program pembangunan merupakan kegiatan yang dirumuskan dan dikendalikan pemerintah, sedangkan keadaan alam sekitar mencakup faktor fisik atau keadaan geografi daerah yang ada pada lingkungan tempat hidup masyarakat tersebut.

Dalam teori perencanaan bahwa metode yang paling cocok untuk memadukan antara pengetahuan ilmiah dan teknis dengan pengetahuan personal/keseharian merupakan perencanaan transaktif (Friedman dalam Hadi, 2001). Dan menurut Burchel pendekatan transaktif merupakan media untuk mengeliminasi kontradiksi antara apa yang kita ketahui dengan bagaimana kita harus melakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan pengetahuan (teori) dalam praktek.

## 2.8 Teori Perencanaan

Teori-teori perencanaan yang dominan sekarang ini sedang mengalami krisis. Menurut Friedman (1987 dalam Hadi, 2001) salah satu sebab dari kondisi ini adalah tidak adanya keterkaitan antara pengetahuan (*knowledge*) dan penerapan atau implementasi (*action*). Teori perencanaan yang ideal adalah yang tidak hanya mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi juga mampu memadukan berbagai nilai dari berbagai kepentingan yang terlibat (Hadi, 2001)

Makna perencanaan sangat tergantung pada paradigma yang dianut. Menurut Davidoff dan Rainer (1962) dalam Hadi (2001) dari paradigma rasional memberikan batasan tentang perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan masa depan melalui suatu urutan pilihan. Sedangkan menurut Dror (1963) dalam Hadi (2001) perencanaan merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan di masa depan. Friedman (1987) dalam Hadi (2001) menyimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu strategi untuk pengambilan keputusan sebelumnya sebagai suatu aktivitas tentang keputusan dan implementasi.

Ada beberapa kritik terhadap model perencanaan rasional. Beberapa modifikasi dan alternatif untuk penyempurnaan perencanaan rasional telah diajukan. Flyvbjerg (1981) dalam Hadi (2001) mengatakan reaksi yang menentang perencanaan rasional muncul sejalan dengan

reaksi terhadap hasil-hasil pembangunan yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh orientasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Model perencanaan yang partisipatif, advokatif dan radikal adalah manifestasi dari reaksi terhadap perencanaan nasional.

Menurut Bolan dan Forester dalam Hadi (2001) menganggap aspek sosial merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan merupakan aktivitas moral. Melalui interaksi dan komunikasi, perencanaan bersama dengan masyarakat membantu merumuskan masalah, menetapkan tujuan, analisis kondisi, mencari alternatif solusi, memilih alternatif terbaik, mengkaji alternatif terbaik dan mengimplementasikan, yang dikenal dengan tujuh langkah perencanaan atau *the seven magic steps of planning* (Boothroyd dikutip Hadi, 2001)

Klasifikasi teori perencanaan sangat bervariasi. Friedman (1987) dalam Hadi (2001) mengembangkan empat kategori yakni teori reformasi sosial, analisis kebijakan, pembelajaran sosial dan mobilisasi. Hudson (1979) dalam Hadi (2001) membagi teori perencanaan ke dalam kategori yang meliputi sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi dan radikal. Di antara kategori tersebut ada beberapa kesamaan, kategori Hudson tentang transaktif dan radikal sejenis dengan kategori Friedman tentang pembelajaran sosial dan mobilisasi sosial.

Perencanaan sinoptik merupakan tradisi yang dominan di mana melihat perencanaan sebagai suatu ilmiah rasional dan non politis.

penting dari proses perencanaan. Dengan kata lain, menurut Burchell (1988) dalam Hadi (2001) pendekatan transaktif merupakan suatu media untuk mengeliminasi kontradiksi antara apa yang kita ketahui dengan bagaimana kita harus melakukan. Tujuan dari dialog adalah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, nilai dan perilaku, kapasitas untuk tumbuh melalui kerja sama dan semangat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Perencana dan masyarakat terlibat dalam proses dialog yang tidak formal, peran perencana lebih sebagai *fasilitator*.

Perencanaan advokasi tujuan utamanya adalah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dengan mengakomodasi gagasan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam perannya sebagai advokat, perencana akan bertindak sebagai penyaji informasi, analisis dari situasi sekarang, pendorong ke arah masa depan dan pemrakarsa akan solusi yang spesifik.

Perencanaan Radikal dikembangkan melalui ide-ide dari gerakan Utopian, Anarki Sosial dan Materialisme Histori. Pendekatan radikal adalah pioner dari teori progresif, karena perencanaan dipandang sebagai aktivitas politik yang mencoba untuk merubah status quo. Friedman dalam Hadi (2001) memberi label strategi ini sebagai mobilisasi sosial karena berangkat dari aksi kolektif dari bawah. Burchell dalam Hadi (2001) menyatakan mobilisasi sosial menekankan pada politik keterpisahan dan konfrontasi. Tujuannya adalah untuk melawan status quo dari kekuasaan yang opresif dibawah kapitalis.

Rasional ilmiah menunjukkan pada metode yang dipergunakan yang mendasarkan pada pemilihan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan dengan memilih jawaban yang benar yang mendasarkan pada kajian dari konsekuensi dari alternatif solusi. Aktivitas non politik menunjukkan bahwa perencanaan merupakan persoalan teknis dan bukan kegiatan politik.

Perencanaan inkremental muncul sebagai respon terhadap sinoptik. Pendekatan inkremental berpendapat bahwa dalam kenyataan pengambilan keputusan dilakukan dalam langkah-langkah inkremental. Jika perencanaan sinoptik memerlukan pengambilan keputusan dengan mengembangkan semua kemungkinan alternatif, maka pendekatan inkremental menuntut pengambilan keputusan dengan hanya mengembangkan beberapa strategi yang paling mungkin.

Perencanaan transaktif dan pembelajaran adalah evolusi dari desentralisasi yang membantu orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Friedman yang dikutip Hudson (1979) dalam Hadi (2001) perencanaan bukan sesuatu yang terpisah dari bentuk-bentuk tindakan sosial (*sosial action*) tetapi merupakan proses yang terkait di dalam evolusi yang terus menerus dari gagasan melalui tindakan. Dalam konteks ini, perencanaan harus dilakukan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang terpengaruh melalui dialog personal. Hal ini merupakan proses pembelajaran yang timbal balik yang merupakan aspek

## **2.9 Kerangka Pemikiran**

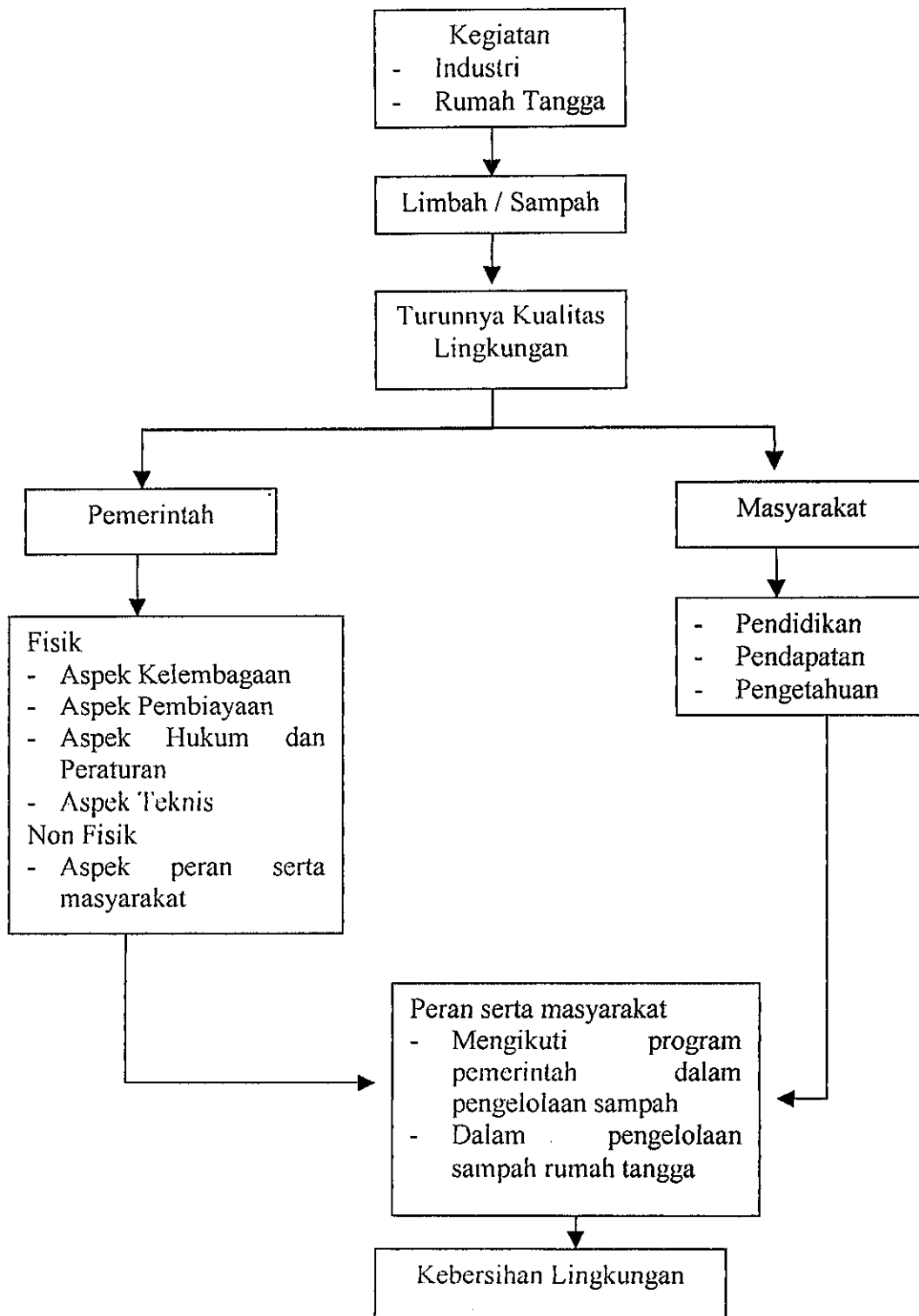
Manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha meningkatkan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan manusia disamping menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan juga menghasilkan produk sampingan yang berupa limbah/sampah. Namun apabila sampah atau limbah tidak segera ditangani akan mengakibatkan pencemaran yang pada akhirnya akan menyebabkan perubahan kualitas lingkungan. Oleh karenanya pengelolaan sampah akan menjadi sangat penting. Dalam pengelolaan sampah diperlukan peran serta manusia baik individu maupun kelompok dan lembaga pemerintah secara terpadu.

Peran pemerintah akan berhasil apabila didukung oleh peran serta masyarakat baik dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, maupun didalam perilakunya secara individu atau kelompok dalam mengelola sampah dan apabila peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan peran serta mereka dalam mengelola sampah cukup besar maka akan tercipta suatu keadaan kota yang tertib, bersih dan indah.

Masyarakat disini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gabungan dari masyarakat, Desa/Kelurahan, keluarga dan individu. Dalam penelitian ini akan menekankan pada peran serta keluarga. Pembatasan ini dimaksudkan dengan mempertimbangkan bahwa pada pelaksanaan program kebersihan dari pemerintah adalah untuk memotivasi setiap keluarga untuk berperan serta pada kegiatan program.

Setiap kegiatan program baik pembinaan maupun lomba kebersihan sasarannya ditekankan pada peran serta aktif kepala keluarga.

Sebagai bagian dari anggota masyarakat peran serta keluarga dalam pengelolaan sampah berbeda antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Perbedaan ini tergantung pada beberapa faktor pengaruh seperti status sosial ekonomi, pengetahuan tentang lingkungan dan harapan keuntungan yang akan diperoleh. Namun pada dasarnya orang akan berperan serta tinggi jika merasa akan memperoleh keuntungan bagi dirinya. Dengan demikian perlu dikaji faktor apa yang paling berpengaruh terhadap peran serta, agar diketahui penentuan prioritas dalam usaha peningkatan peran serta tersebut. Diagram alur pemikirannya sebagai berikut :



Gambar 1  
Diagram Alur Pemikiran

## **2.9 Hipotesis**

1. Ada pengaruh positif tingkat pendidikan, pendapatan dan pengetahuan terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
2. Ada pengaruh positif peranan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap keberhasilan penciptaan kebersihan lingkungan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kota Denpasar. Pemilihan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan karena kota Denpasar disamping sebagai ibu kota dari kota Denpasar juga merupakan ibu kota Propinsi Bali, menjadi pusat perdagangan, pendidikan, industri dan pariwisata.

Kondisi ini berakibat pada tingginya laju pertumbuhan penduduk di kota Denpasar, sehingga berpengaruh pada peningkatan volume sampah. Kota Denpasar merupakan penyumbang sampah terbesar di propinsi Bali yaitu sebesar 44 % (Neraca Kualitas Lingkungan Daerah Kota Denpasar, 2000).

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini lebih memfokuskan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui permasalahan serta untuk mendapatkan informasi-informasi dan data yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini akan ditunjang penelaahan pustaka terutama sekali pada penyusunan kerangka pemikiran.

### **3.3 Tipe Penelitian**

Berdasarkan masalah yang penulis ajukan maka digunakan penelitian deskriptif, analisa kuantitatif dan kualitatif. Analisa kuantitatif digunakan untuk mendapatkan tinggi rendahnya peran serta masyarakat di wilayah studi dan faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi peran serta masyarakat dimana datanya diperoleh dari penyebaran kuesioner.

Sedangkan analisa kualitatif dipergunakan untuk menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di masyarakat dan menggali peranan pemerintah didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan dalam bidang kebersihan dimana datanya didapatkan melalui wawancara dengan pemegang informasi kunci.

Metode deskriptif diartikan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian baik seseorang maupun masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1983)

### **3.4 Sumber Data**

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil pengumpulan sendiri melalui kuesioner dengan responden yang terdiri dari :
  - a. Penanganan sampah rumah tangga yang meliputi karakteristik sampah yang dihasilkan, teknik operasional dan peran serta

masyarakat sebagai sumber timbulan dalam pengelolaan sampah.

2. Data sekunder yang merupakan rujukan yang akan dipergunakan untuk analisa kajian referensi, literatur dan standarisasi yang menyangkut tentang pengelolaan sampah.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan perangkat kuesioner, wawancara atau tatap muka, metode visualisasi atau dokumentasi dan observasi.

#### **3.5.1 Teknik Kuesioner**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh yang menjadi sasaran atau responden. Responden dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang dianggap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Jumlah populasi kepala keluarga di Kota Denpasar cukup besar maka diambil sampel responden dengan menggunakan tehnik purposive sampling, artinya pengambilan sampel berdasarkan tujuan. (Margono, S, 1997).

Jumlah sampel yang diambil 120 kepala keluarga. Pengambilan sampel dilakukan di 6 (enam) desa / kelurahan yang mewakili masing-masing kecamatan. Untuk kecamatan Denpasar Barat diambil desa Padang Sambian Klod dan desa Tegal Harum, untuk

kecamatan Denpasar Timur diambil kelurahan Kesiman dan Penatih, untuk Denpasar Selatan diambil Desa Sidakarya dan kelurahan Panjer.

Pengambilan sampel dilakukan atas dasar tingkat kebersihan lingkungan yang ditentukan dalam lomba kebersihan lingkungan dimana desa/kelurahan yang berhasil mewujudkan kebersihan lingkungan dengan skor tertinggi dan desa/kelurahan yang belum berhasil dengan skor terendah.

Kota Denpasar masih terbentuk lembaga teknis daerah yang berbentuk desa dan kelurahan. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah dan diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat walikota/bupati atas usul camat. Sedangkan desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak usul-usul yang bersifat sementara (Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999).

Dalam penyebaran kuesioner peneliti melakukan sendiri untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengisian kuesioner oleh responden.

### 3.5.2 Wawancara

Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yang ditujukan kepada sumber informasi yaitu tokoh masyarakat dan pejabat dari Dinas

Kebersihan dan Pertamanan. Adapun tehnik wawancara yang digunakan adalah Key Informan.

### 3.5.3 Teknik Dokumentasi

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data. Data ini diperoleh dari buku, laporan dan sumber lainnya yang bersifat tertulis.

### 3.5.4 Observasi (Pengamatan)

Peneliti juga melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

## 3.6 Metode Analisis Data

### 3.6.1 Cara Analisis Data

#### a. Pemilahan Data

Suatu usaha untuk mengoreksi jawaban dari responden yang kurang lengkap atau dirasa menyimpang selanjutnya data yang telah terkumpul diedit dimana beberapa data yang bersifat kualitatif dikonversi ke data kuantitatif.

#### b. Penilaian Data

Suatu usaha untuk mengklasifikasikan jawaban responden dengan jalan memberi skor.

Penentuan kisaran skor dari kuesioner yang disusun berdasarkan skala rensis likert untuk mengukur perilaku peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Penilaian masing-masing item bergerak antara

1 sampai 4. Skor tersebut dijumlahkan dan jumlah ini merupakan total skor. Total skor ini ditafsirkan sebagai posisi responden dalam skala rensis likert. (Aswar, 1998). Adapun penentuan jumlah skoring ini disesuaikan dengan jumlah pertanyaan yang ada pada kuesioner. Dengan asumsi akan mempunyai skor tinggia apabila semua responden memilih skor dengan nilai tertinggi atau 4 kemudian dikalikan dengan jumlah pertanyaan, mempunyai skor rendah apabila semua responden memilih skor dengan nilai terendah atau 1 kemudian dikalikan dengan jumlah pertanyaan dan mempunyai skor sedang apabila berada pada rentang nilai skor tertinggi dan nilai skor terendah. (Lihat lampiran 1).

Kebersihan lingkungan tinggi apabila mempunyai skor 16, sedang apabila mempunyai skor 3 – 15 dan rendah apabila mempunyai skor 4.

Peranan pemerintah tinggi akan mempunyai skor 52, sedang jika mempunyai 14-51 dan rendah jika mempunyai skor 13.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah tinggi jika mempunyai skor 44, sedang jika mempunyai skor 12- 43 dan rendah jika mempunyai skor 11.

Peran serta masyarakat dalam memperlakukan sampah rumah tangga tinggi jika mempunyai skor 24, sedang jika mempunyai skor 7 - 23 dan rendah jika mempunyai skor 6.

Pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Sampah dan UULH tinggi jika mempunyai skor 20, sedang jika mempunyai skor 6-19 dan rendah jika mempunyai skor 5.

Tingkat pendidikan masyarakat tinggi apabila mempunyai skor 4, sedang apabila mempunyai skor 2 - 3 dan rendah jika mempunyai skor 1.

Tingkat pendapatan masyarakat tinggi apabila mempunyai skor 4, sedangkan apabila mempunyai skor 2 - 3 dan rendah jika mempunyai skor 1

### **3.7 Teknik Analisis Data**

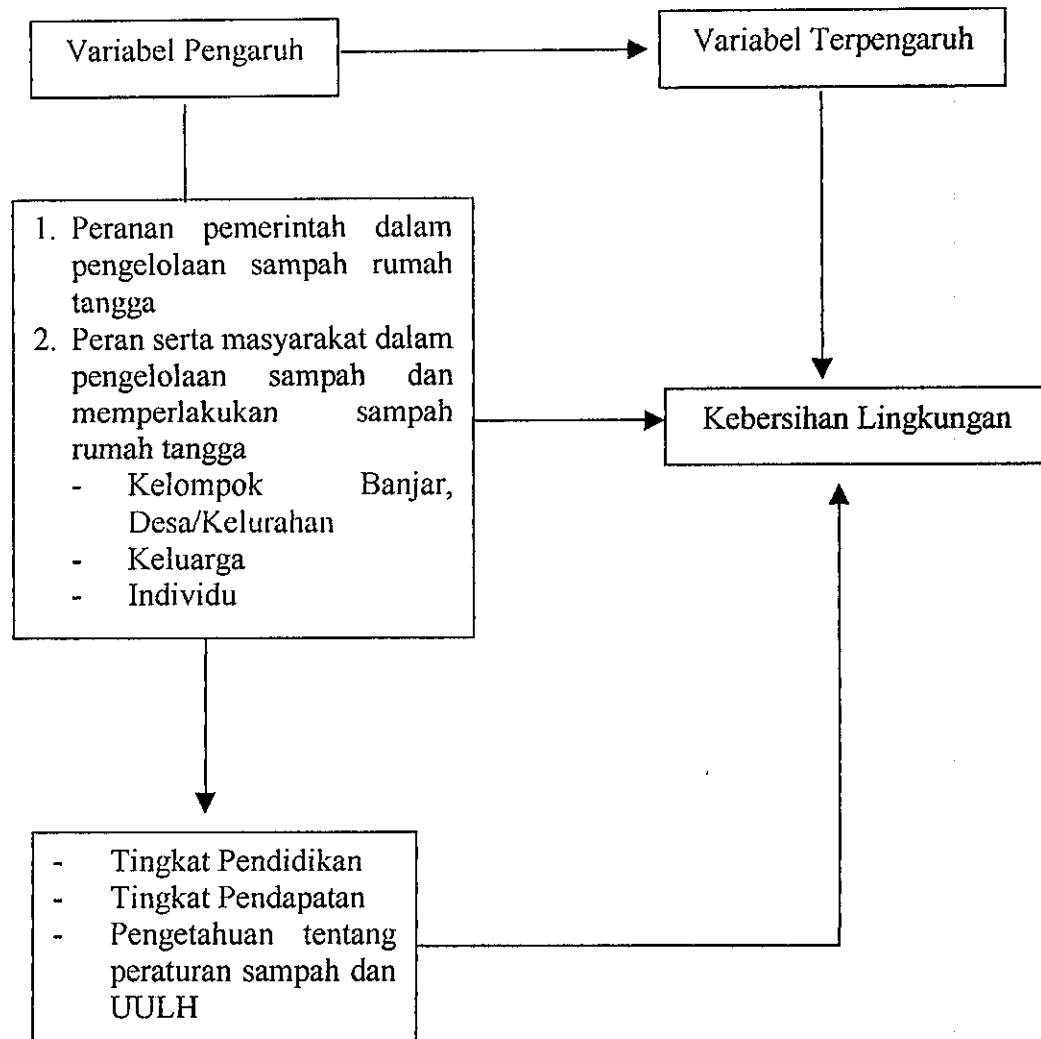
- a. Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tabulasi frekuensi, analisis regresi dengan menggunakan taraf signifikansi 95 %. Untuk memudahkan analisis data secara kuantitatif akan digunakan program SPSS.
- b. Dalam menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu kawasan yang direncanakan untuk menguraikan potensi-potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan kawasan digunakan analisis SWOT. (Rangkuti, 2000)

SWOT merupakan akronim dari variabel-variabel penilaian sebagai berikut :

- “Strength” yang berarti potensi yang dimiliki kawasan
- “Weakness” yang berarti masalah yang terdapat di suatu kawasan
- “Opportunities” yang berarti peluang pengembangan yang terdapat di suatu kawasan
- “Threats” yang berarti tantangan yang dihadapi kawasan yang diteliti dalam hal ini adalah kota Denpasar.

### **3.8 Variabel Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, dalam penelitian menggunakan variabel utama dan variabel pendukung. Batasan variabel tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 2

Skema Hubungan Antara Variabel Penelitian

Batasan-batasan variabel-variabel tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Kebersihan lingkungan diukur dari : a) Kebersihan halaman, b) Kebersihan jalan, c) Kebersihan selokan dan d) Kebersihan sekitar TPS.
- Peranan pemerintah dalam pengelolaan sampah diukur dari a) penyediaan tenaga pengumpul sampah, b) alat pengangkut sampah, c) Pengangkutan sampah, d) Penyelenggaraan penyuluhan, e) Membuat peraturan tentang sampah
- Peran serta masyarakat mengikuti program pemerintah dalam pengelolaan sampah diukur dari a) keikutsertaan (ikut atau tidaknya), b) frekuensi kehadiran dalam setiap kegiatan dan c) aktivitas yang dilakukan selama hadir dalam setiap kegiatan penyuluhan, kerja bakti dan pembayaran retribusi.
- Peran serta dalam memperlakukan sampah rumah tangga diukur dari : a) Lokasi pembuangan sampah, b) Perlakuan terhadap sampah sebelum dibuang, c) Penyediaan tempat sampah, d) Bahan yang digunakan untuk tempat sampah, e) Tindakan terhadap sampah rumah tangga yang tidak diambil petugas dan f) Tindakan terhadap sampah rumah tangga yang berserakan.
- Pengetahuan masyarakat tentang peraturan sampah dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, ukuran pengetahuan responden mencakup : a) Peraturan tentang sampah, b) Pelaku pemeliharaan lingkungan dan c) Pengetahuan tentang pencemaran.
- Tingkat pendapatan adalah pendapatan masing-masing keluarga per bulan.
- Tingkat pendidikan yaitu tingkat pendidikan formal dari responden.

UPT-POSTAK-UNDIP

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Rona Lingkungan Daerah Penelitian**

##### **4.1.1 Letak Geografis**

Kota Denpasar terletak di tengah-tengah Pulau Bali, selain merupakan ibu kota Denpasar, juga merupakan ibu kota Propinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian dan pusat-pusat kegiatan lainnya.

Letak tersebut merupakan kondisi yang sangat strategis, baik dari segi ekonomi maupun kepariwisataan karena merupakan titik sentral berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya. Kota Denpasar terletak diantara  $8^{\circ} 35' 31''$  lintang selatan dan  $115^{\circ} 01' 23''$  bujur timur, yang berbatasan dengan :

- Disebelah Utara Kabupaten Badung
- Disebelah Timur Kabupaten Gianyar
- Disebelah Selatan Kabupaten Badung
- Disebelah Barat Kabupaten Badung

Ditinjau dari topografi keadaan wilayah kota Denpasar secara umum miring ke arah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0-75 m diatas permukaan laut. Morfologi landai dengan kemiringan lahan

sebagian besar berkisar antara 0-5 % namun di bagian tepi kemiringannya bisa mencapai 15 %.

#### **4.1.2 Luas Wilayah Dan Keadaan Tanah**

Luas wilayah kota Denpasar 127,78 Km<sup>2</sup> atau 12.778 ha sebelumnya 123,98 Km<sup>2</sup>. Ini merupakan tambahan reklamasi pantai serangan seluas 380 ha (3,80 Km<sup>2</sup>). Dari luas tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Barat seluas 50,06 Km<sup>2</sup> terdiri dari 5 kelurahan dan 13 Desa dimana Desa Padang Sambian Klod dan Desa Tegal Harum merupakan daerah penelitian. Kemudian Kecamatan Denpasar Timur dengan luas 27,73 Km<sup>2</sup> terdiri dari 5 kelurahan dan 10 Desa dimana kelurahan Sumerta dan Kelurahan Panatih sebagai daerah penelitian.

Dan Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas 49,99 Km<sup>2</sup> terdiri dari 6 kelurahan dan 4 Desa, dimana Desa Sidakarya dan kelurahan Panjer merupakan daerah penelitian.

Dari luas tanah yang ada di Kota Denpasar Tata Guna tanahnya meliputi tabah sawah 3.205 ha dan tanah kering 9.573 ha. Tanah kering terdiri dari tanah pekarangan 7.206 ha, tanah tegalan 396 ha, tanah sementara tidak diusahakan 166 ha, tanah hutan 613 ha, tambak/kolom 8 ha dan tanah lainnya 1.149 ha.

### **4.1.3 Iklim**

Kota Denpasar termasuk daerah termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi angin musim sehingga memiliki musim kemarau dengan angin timur (Juni – September) dan musim Hujan dengan angin barat (September – Maret) dan diselingi oleh musim Pancaroba.

Suhu rata-rata berkisar antara  $26,40^{\circ}\text{C}$  –  $28,00^{\circ}\text{C}$  dengan suhu maksimum jatuh pada bulan Februari, sedangkan suhu minimum pada bulan Agustus. Besarnya curah hujan rata-rata per tahun mencapai 2.140 mm dengan bulan terbasah jatuh pada bulan Januari sebesar 404 mm dan bulan basah selama bulan November – April, sedangkan bulan terkering jatuh pada bulan Agustus dengan bulan-bulan kering dari bulan Juni – Oktober.

### **4.1.4 Jumlah Penduduk Dan Kepadatan**

Kota Denpasar terdiri dari 3 kecamatan, 43 desa/kelurahan, meliputi kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Timur dan Denpasar Barat. Luas masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Selatan  $49,99\text{ Km}^2$ , Denpasar Timur  $27,73\text{ Km}^2$  dan Denpasar Barat  $50,06\text{ Km}^2$ .

Tabel 3 Luas Wilayah dan Tingkat Kepadatan Penduduk  
 Dirinci Per Kecamatan (Dalam Km<sup>2</sup>)  
 Tahun 2000

| No | Kecamatan            | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah | Kepadatan (Jiwa/Ha) |
|----|----------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 1  | Denpasar Selatan     |                 |              |                     |
|    | - Pemogan            | 22.025          | 9,71         | 2.268               |
|    | - Pedungan           | 18.977          | 7,49         | 2.534               |
|    | - Sesetan            | 32.174          | 7,39         | 4.354               |
|    | - Serangan           | 2.967           | 4,81         | 617                 |
|    | - Sidakarya          | 12.282          | 3,89         | 3.157               |
|    | - Panjer             | 19.450          | 3,59         | 5.418               |
|    | - Renon              | 10.065          | 2,54         | 3.963               |
|    | - Sanur Kauh         | 11.238          | 3,86         | 2.911               |
|    | - Sanur              | 13.293          | 4,02         | 3.307               |
|    | - Sanur Kaja         | 7.182           | 2,69         | 2.669               |
|    | Jumlah               | 149.653         | 49,99        | 31.198              |
| 2  | Denpasar Timur       |                 |              |                     |
|    | - Dangin Puri Klod   | 12.572          | 1,42         | 8.854               |
|    | - Sumerta Klod       | 12.092          | 2,71         | 4.462               |
|    | - Kesiman            | 11.255          | 2,66         | 4.231               |
|    | - Kesiman Petilan    | 8.246           | 2,90         | 2.843               |
|    | - Kesiman Kertalangu | 13.804          | 4,05         | 3.408               |
|    | - Sumerta            | 7.801           | 0,52         | 15.002              |
|    | - Sumerta Kaja       | 7.829           | 0,73         | 10.725              |
|    | - Sumerta Kauh       | 7.098           | 0,69         | 7.879               |
|    | - Dangin Puri Kangin | 7.178           | 0,75         | 9.571               |
|    | - Dangin Puri        | 7.451           | 0,65         | 11.463              |
|    | - Dangin Puri Kauh   | 4.189           | 0,72         | 5.818               |

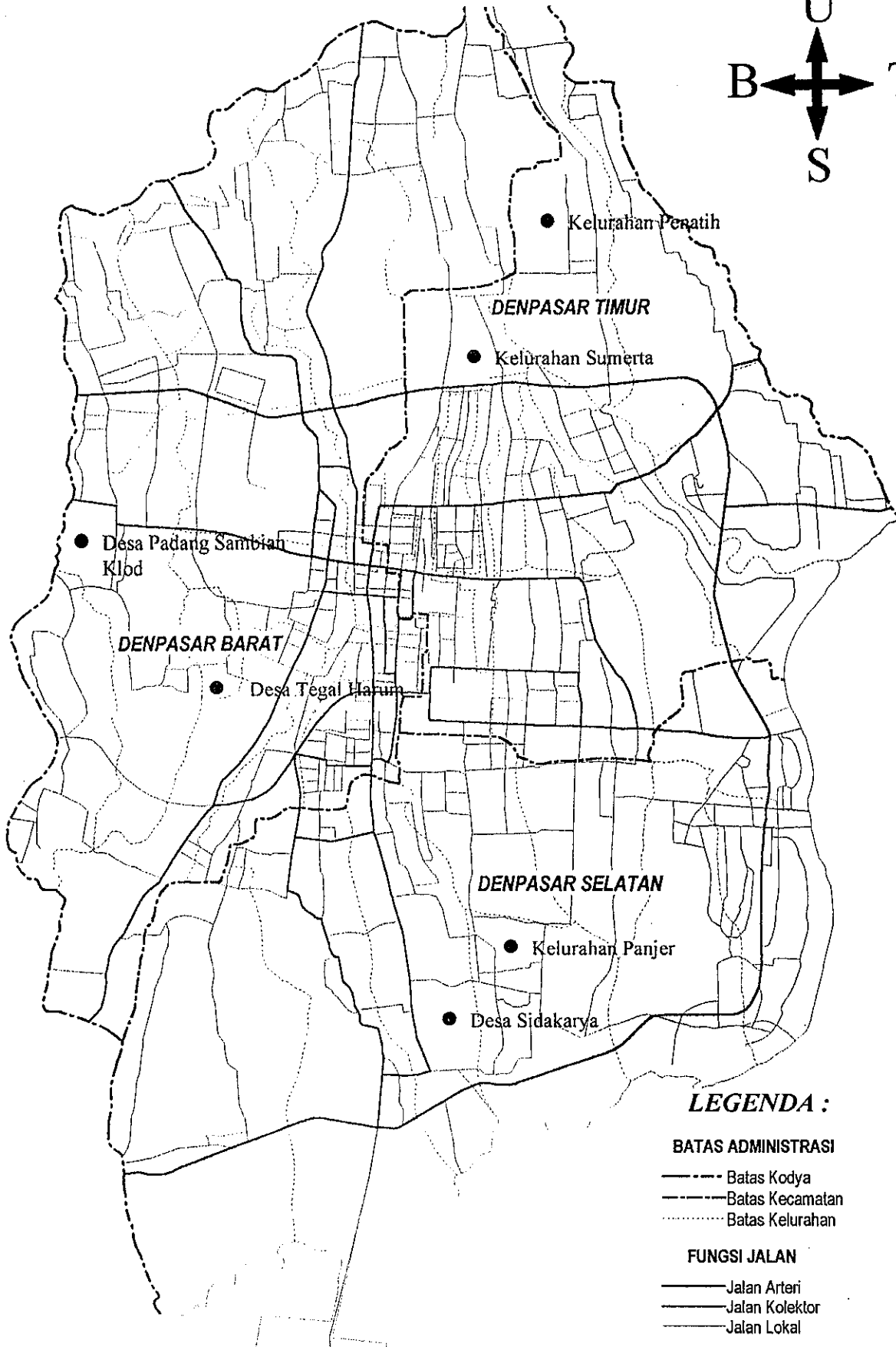
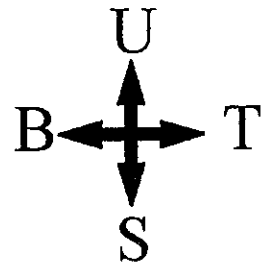
Tabel 3 Luas Wilayah dan Tingkat Kepadatan Penduduk  
Dirinci Per Kecamatan (Dalam Km<sup>2</sup>)  
Tahun 2000  
(Lanjutan)

|   |                         |         |       |         |
|---|-------------------------|---------|-------|---------|
|   | - Daging Puri Kaja      | 13.677  | 1,42  | 9.632   |
|   | - Tonja                 | 15.412  | 2,30  | 6.701   |
|   | - Penatih               | 7.502   | 2,81  | 2.670   |
|   | - Penatih Daging Puri   | 4.433   | 3,20  | 1.388   |
|   | Jumlah                  | 140.549 | 27,73 | 104.743 |
| 3 | Denpasar Barat          |         |       |         |
|   | - Padang Sambian Klod   | 8.888   | 4,12  | 2.157   |
|   | - Pemecutan Klod        | 29.395  | 4,50  | 6.532   |
|   | - Dauh Puri Kauh        | 17.989  | 1,90  | 9.468   |
|   | - Dauh Puri Klod        | 13.697  | 1,88  | 7.286   |
|   | - Dauh Puri             | 8.217   | 0,60  | 13.695  |
|   | - Dauh Puri Kangin      | 3.602   | 0,59  | 6.105   |
|   | - Pemecutan             | 17.332  | 1,86  | 9.318   |
|   | - Padang Sambian        | 17.844  | 0,50  | 35.688  |
|   | - Pemecutan Padang Kaja | 29.285  | 0,35  | 83.671  |
|   | - Dauh Puri Kaja        | 12.054  | 3,74  | 3.223   |
|   | - Padang Sambian Kaja   | 10.696  | 4,90  | 2.182   |
|   | - Ubung                 | 7.156   | 3,85  | 1.858   |
|   | - Ubung Kaja            | 10.227  | 1,09  | 9.382   |
|   | - Peguyangan            | 7.817   | 1,03  | 7.589   |
|   | - Peguyangan Kangin     | 8.391   | 4,00  | 2.098   |
|   | - Peguyangan Kaja       | 4.650   | 6,44  | 722     |
|   | - Tegal Harum           | 10.127  | 5,36  | 1.889   |
|   | - Tegal Kerta           | 14.127  | 4,16  | 3.395   |
|   | Jumlah                  | 232.179 | 50,06 | 206.258 |

Sumber : Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Timur, dan Denpasar Barat Dalam Angka Tahun 2000

Berdasarkan tabel 3 diatas jumlah penduduk di Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 149.653 jiwa dengan luas wilayah 49,99 Km<sup>2</sup> maka tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.994 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan untuk Denpasar Timur jumlah penduduknya sebesar 140.549 jiwa dengan luas wilayah 27,73 Km<sup>2</sup> maka tingkat kepadatan penduduknya sebesar 5.068 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dan untuk Denpasar Barat jumlah penduduknya sebesar 232.179 jiwa dengan luas wilayah 50,06 Km<sup>2</sup> maka tingkat kepadatan penduduknya sebesar 4.638 jiwa/Km<sup>2</sup>.

# KOTA DENPASAR



## LEGENDA :

### BATAS ADMINISTRASI

- Batas Kodya
- Batas Kecamatan
- ..... Batas Kelurahan

### FUNGSI JALAN

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

## **4.2 Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Denpasar dalam pengelolaan sampah rumah tangga meliputi aspek fisik dan aspek non fisik.

### **4.2.1 Aspek Fisik**

Aspek fisik yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam pengelolaan sampah rumah tangga meliputi :

#### **4.2.1.1 Aspek Kelembagaan**

- a. Institusi yang mengelola persampahan di kota Denpasar adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepada Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 713 Tahun 1993 dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tanggal 30 September 1994 yaitu tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

#### **4.2.1.2 Aspek Teknis Operasional**

Jumlah personil pelaksana pengelolaan sampah di Kota Denpasar yaitu :

- a. Sektor penyapuan didukung oleh tenaga sebanyak 466 orang
- b. Sektor pengumpulan didukung oleh tenaga sebanyak 33 orang
- c. Sektor pengangkutan didukung oleh tenaga sebanyak 364 orang
- d. Sektor pemusnahan didukung oleh 10 tenaga operator alat berat

Menurut Syafrudin, Priyambada (2001) bahwa perbandingan jumlah personil pelaksana pengelolaan sampah adalah 1 : 1000 penduduk. Melihat jumlah personil pelaksana pengelolaan sampah yang ada yaitu sebanyak 873 orang maka masih kekurangan jumlah personil pelaksana pengelolaan sampah sebanyak 3.045 orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Denpasar pada tahun 2000 yaitu 522.381 jiwa.

Adapun teknis operasional pengelolaan sampah di kota Denpasar meliputi :

a. Tahap Pevadahan

Yang dimaksud dengan pevadahan adalah tempat sementara di sumber timbulan dibuang untuk itu maka perlu diperhatikan tempat penampungan itu dan letaknya. Misalnya jika cara penampungan kurang tepat atau tidak sehat dapat menarik serangga serta tikus juga dapat menimbulkan bau. Adapun syarat tempat yang dianjurkan tidak mudah terbakar. Dalam tahap pevadahan masyarakat di kota Denpasar biasanya menaruh sampah pada bak sampah.

b. Tahap Pengumpulan

Operasi pembersihan dan pengumpulan sampah di kota Denpasar saat ini mengikuti pola konvensional, yaitu sampah dari sumber-sumbernya dikumpulkan. Ditempat Penampungan Sementara (TPS). Untuk selanjutnya diangkut ke TPA. Pemerintah menyediakan

sarana dan prasarana kebersihan yang perkembangannya dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4 Perkembangan Sarana dan Prasarana Kebersihan Di Kota Denpasar tahun 1996-2000**

| No | Tahun | Sarana dan Fasilitas Kebersihan |             |          |                |           |         |        |
|----|-------|---------------------------------|-------------|----------|----------------|-----------|---------|--------|
|    |       | Truk Biasa                      | Truk Armrol | Buldozer | Gerobak sampah | Container | TPS     | TPA    |
| 1  | 1996  | 15 unit                         | 5 unit      | 1 unit   | 50 unit        | 19 unit   | 15 unit | 1 unit |
| 2  | 1997  | 15 unit                         | 5 unit      | 1 unit   | 55 unit        | 22 unit   | 15 unit | 1 unit |
| 3  | 1998  | 15 unit                         | 7 unit      | 2 unit   | 65 unit        | 27 unit   | 15 unit | 1 unit |
| 4  | 1999  | 17 unit                         | 7 unit      | 3 unit   | 75 unit        | 27 unit   | 17 unit | 1 unit |
| 5  | 2000  | 17 unit                         | 7 unit      | 3 unit   | 90 unit        | 31 unit   | 17 unit | 1 unit |

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar

**c. Tahap Pengangkutan**

Kegiatan pengangkutan sampah di kota Denpasar saat ini dilakukan dalam 4 (empat) shift sehari yaitu :

- Shift I (pagi hari) mulai jam 05.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah. Sasaran utama sampah-sampah di jalan-jalan utama / protokol.
- Shift II (siang hari) mulai jam 12.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah Pengangkutan ditujukan di jalan-jalan kolektor dan sisa shift I
- Shift III (sore hari) mulai jam 17.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah Sasarannya adalah sampah sisa shift II terutama di TPS.

- Shift IV (malam hari) mulai jam 21.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah. Sasaran utamanya adalah jalan-jalan protokol yang siang hari volume lalu lintasnya cukup padat. Khusus pengangkutan container dilaksanakan mulai 07.00 sampai dengan 17.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah.

Kapasitas truk angkutan sampah dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 5 Kapasitas Truk Angkutan Sampah di Kota Denpasar Tahun 2000

| No     | Jenis Truk | Jumlah Truk (Unit) | Kapasitas (M <sup>3</sup> ) | Jumlah Shif | Total yang Terangkut |
|--------|------------|--------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 1      | Truk Biasa | 17                 | 8                           | 4           | 544                  |
| 2      | Truk Amrol | 7                  | 6                           | 4           | 168                  |
| Jumlah |            |                    |                             |             | 712                  |

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa jumlah truk yang ada mampu mengangkut sampah sebanyak 712 m<sup>3</sup>. Sedangkan volume sampah yang ada di kota Denpasar tahun 2000 yaitu sebanyak 960 m<sup>3</sup> sehingga ada sisa yang belum terangkut sebanyak 248. Hal ini berarti masih kekurangan lagi truk biasa lagi 8 unit.

#### d. Tahap Penyelesaian Akhir

Lokasi Tempat Pembuangan Akhir terletak didaerah Desa Suwung, Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas areal kurang lebih 10,30 Ha

(luas efektif 8,5 Ha). Pengelolaan sampah pada lokasi tempat pembuangan akhir merupakan tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Denpasar. Sistem yang digunakan dalam bentuk open dumping. Metode open dumping sudah tidak dirokemendasikan karena sangat boros dengan lahan, metode yang disarankan yaitu dengan sistem tanam timbun sehingga terbebas dari nyamuk, lalat dan tikus yang bisa menyebabkan penyakit bagi masyarakat di sekitar lokasi (Yusindrawan, 2000).

#### 4.2.1.3 Aspek Legal/Peraturan

Pengelolaan sampah di kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2000 tentang ketertiban dan kebersihan lingkungan yang menekankan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dalam pasal 37 Peraturan Daerah Propinsi Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 disebutkan “Barang siapa yang melalaikan atau melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat dituntut dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)”.

Memperhatikan bunyi pasal diatas, jelaslah bahwa sifatnya mengatur, mengingatkan dan memaksa. Pemerintah kota Denpasar menyadari bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam hal kebersihan tidak akan bisa berhasil tanpa adanya ancaman hukum yang bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Selama tahun 2000 Dinas Ketentraman dan Ketertiban telah mampu menjaring sebanyak 5.224 orang pelaku

pelanggaran Perda. Melihat jumlah tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat pemerintah daerah kota Denpasar belum melibatkan Desa Adat yang merupakan kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (pura) yang punya wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001)

#### 4.3.1.4 Aspek Keuangan/Finansial

Pembiayaan merupakan hal yang sangat berperan dalam pengelolaan kebersihan khususnya untuk menunjang operasionalnya. Menurut Syafrudin, Priyambada (2000) mengatakan bahwa dana untuk pengelolaan sampah suatu kota besarnya 5-10 % dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Biaya yang dianggarkan untuk pengelolaan sampah tahun 2000 sebesar Rp. 2.588.990.440 atau sebesar 1,36 % dari jumlah APBD kota Denpasar tahun 2000 yaitu Rp. 190.663.490.614. Jadi jumlah ini masih kurang jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada.

Tarif retribusi sampah ditetapkan berdasarkan SK Walikota Denpasar nomor 10 tahun 2001. Besarnya retribusi sampah ditetapkan sebagai berikut :

1. Rumah tangga A<sub>1</sub> untuk perumahan yang di muka rumahnya terdapat jalan umum sebesar Rp. 6000

2. Rumah tangga A<sub>2</sub> perumahan yang mempunyai lebar termasuk got diatas 10 meter sebesar Rp. 5000
3. Rumah tangga A<sub>3</sub> untuk perumahan yang mempunyai jalan yang lebarnya 7-10 meter sebesar Rp. 4000
4. Rumah tangga A<sub>4</sub> untuk perumahan yang mempunyai jalan yang lebarnya termasuk got 0–3,99 meter sebesar Rp. 3000

Menurut Syafrudin, Priambada (2000) tarif retribusi yang ditarik dari masyarakat 1 % dari penghasilan per rumah tangga. Pendapatan perkapita penduduk kota Denpasar tahun 2000 sebesar Rp. 1.500.000. Jadi jumlah retribusi yang seharusnya dibayar oleh masyarakat adalah Rp. 15.000. Besarnya retribusi sampah di kota Denpasar berkisar antara Rp. 3000 – Rp. 6.000, jadi jumlah ini masih kurang jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada.

#### **4.2.2 Aspek Non Fisik**

Disamping aspek fisik, upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam pengelolaan sampah rumah tangga juga melakukan pendekatan dengan aspek non fisik melalui peningkatan peran serta masyarakat. Dalam upaya tersebut, pemerintah kota Denpasar melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

##### **a. Mengadakan Penyuluhan**

Penyuluhan akan memberikan penerangan dan dapat menanamkan kesadaran kepada warga masyarakat bahwa menciptakan lingkungan yang bersih, harus dimulai dari pribadi sampai kemudian sebagai

anggota masyarakat. Penyuluhan dilaksanakan 1 bulan sekali di masing-masing desa/kelurahan. Melihat adanya kemauan masyarakat untuk melaksanakan program pemerintah melalui penyuluhan cukup baik maka program ini perlu ditingkatkan dengan menambah jumlah frekuensi pelaksanaan penyuluhan.

b. Mengadakan Perlombaan Kebersihan

Usaha lain dalam mendorong peran serta masyarakat adalah mengadakan perlombaan kebersihan. Perlombaan kebersihan biasanya diadakan 1 tahun sekali pada saat menjelang hari ulang tahun kota Denpasar. Untuk mendorong semangat peserta lomba diberikan hadiah uang dan tropi. Kegiatan ini cukup efektif untuk dilaksanakan karena dapat mendorong partisipasi masyarakat di dalam mengelola sampah rumah tangga. Dengan melihat kondisi tersebut diatas maka perlu ditingkatkan frekuensi pelaksanaan lomba kebersihan pada hari-hari besar yang lainnya seperti Hari Proklamasi Kemerdekaan RI. Pelaksanaan lomba kebersihan akan menumbuhkan rasa bangga bagi pemenangnya. (Durin, 1985)

#### **4.3 Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga**

Menurut Barlian (2000) dan Sastropetro (1988) bahwa peran serta masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pendapatan dan pengetahuan. Berdasarkan pendapat diatas maka akan dicari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat di Kota Denpasar

dalam upaya pengelolaan sampah rumah tangga yang meliputi tingkat pendidikan, pendapatan dan pengetahuan masyarakat di kota Denpasar.

#### 4.3.1 Tingkat Pendidikan

Faktor tingkat pendidikan masyarakat perlu mendapat perhatian dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga orientasi melibatkan warga masyarakat dapat berjalan secara lancar. Komposisi responden menurut pendidikan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6 Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Kategori     | Desa/Kelurahan yang menjadi juara |     |                          |     |                |     | Desa/Kelurahan yang tidak menjadi juara |     |                  |     |             |     | Jml | %     | Jml | %     |
|--------------|-----------------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------|-----|---|-----|------------------|-----|-------------|-----|-----|-------|-----|-------|
|              | Kelurahan Sumerta                 |     | Desa Padang Sambian Klod |     | Desa Sidakarya |     | Kel. Penatih                            |     | Desa Tegal Harum |     | Desa Panjer |     |     |       |     |       |
|              | Jml                               | %   | Jml                      | %   | Jml            | %   | Jml                                     | %   | Jml              | %   | Jml         | %   |     |       |     |       |
| Tinggi (4)   | 6                                 | 30  | 8                        | 40  | 11             | 55  | 5                                       | 25  | 7                | 35  | 5           | 25  | 25  | 41,64 | 17  | 28,33 |
| Sedang (2-3) | 11                                | 55  | 11                       | 11  | 9              | 45  | 12                                      | 60  | 6                | 30  | 11          | 55  | 31  | 52,00 | 29  | 48,00 |
| Rendah (1)   | 3                                 | 15  | 1                        | 1   | -              | -   | 3                                       | 15  | 7                | 35  | 4           | 20  | 4   | 6,36  | 14  | 23,67 |
|              | 20                                | 100 | 20                       | 100 | 20             | 100 | 20                                      | 100 | 20               | 100 | 20          | 100 | 60  | 100   | 60  | 100   |

Sumber : Data Primer, 2002

Berdasarkan tabel 6 diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden di desa/kelurahan yang menjadi juara sebesar 52 % dan desa/kelurahan yang tidak menjadi juara sebesar 48 % memiliki pendidikan dalam kategori sedang. Namun jika dilihat dari jumlah prosentase menunjukkan bahwa komposisi tingkat pendidikan responden di desa/kelurahan yang menjadi juara lebih besar. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan peran serta masyarakat.

Faktor pendidikan sebagai salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa secara umum tingkat pendidikan mencerminkan tingkat perkembangan daya nalar dan pemahaman masyarakat dalam menilai suatu baik atau buruk bagi dirinya dan lingkungannya. (Barlian, 2000)

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Ir. Made Widiyasa yang mengatakan :

“ Tidak setiap orang mempunyai kecepatan yang sama dalam mengadopsi sesuatu yang berkaitan dengan program-program kebersihan tergantung dari tingkat pendidikannya “

(Hasil wawancara tanggal 30 Juli 2002)

#### 4.3.2 Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga

Pendapatan merupakan unsur penting bagi setiap orang, karena dengan adanya penghasilan manusia mampu meningkatkan kesejahteraan komposisi responden menurut pendapatannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7 Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

| Kategori     | Desa/Kelurahan yang menjadi juara |     |                   |     |                |     | Desa/Kelurahan yang tidak menjadi juara |     |                  |     |                  |     | Jml | %   | Jml | %     |
|--------------|-----------------------------------|-----|-------------------|-----|----------------|-----|---|-----|------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
|              | Kelurahan Sumerta                 |     | Desa Sambian Klod |     | Desa Sidakarya |     | Desa Penatih                            |     | Desa Tegal Harum |     | Kelurahan Panjer |     |     |     |     |       |
|              | Jml                               | %   | Jml               | %   | Jml            | %   | Jml                                     | %   | Jml              | %   | Jml              | %   |     |     |     |       |
| Tinggi (4)   | 8                                 | 40  | 4                 | 20  | 3              | 15  | 5                                       | 25  | 4                | 20  | 3                | 15  | 15  | 25  | 12  | 20,00 |
| Sedang (2-3) | 11                                | 55  | 14                | 70  | 14             | 70  | 11                                      | 55  | 13               | 65  | 13               | 65  | 39  | 65  | 37  | 61,66 |
| Rendah (1)   | 1                                 | 5   | 2                 | 10  | 3              | 15  | 4                                       | 20  | 3                | 15  | 4                | 20  | 6   | 20  | 11  | 18,34 |
|              | 20                                | 100 | 20                | 100 | 20             | 100 | 20                                      | 100 | 20               | 100 | 20               | 100 | 60  | 100 | 60  | 100   |

Sumber : Data Primer, 2002

Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok responden di desa/kelurahan yang menjadi juara sebesar 65 %, demikian juga desa/kelurahan yang tidak menjadi juara sebesar 61 % memiliki tingkat pendapatan dalam kategori sedang. Hal ini diartikan bahwa antara kelompok penduduk di desa/kelurahan yang menjadi juara dan yang tidak menjadi juara adalah sama yakni pada tingkat sedang. Namun jika dilihat dari jumlah prosentase menunjukkan bahwa komposisi tingkat pendapatan responden di desa/kelurahan yang menjadi juara lebih besar. Hal ini berarti bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap peran serta masyarakat.

“ Dengan pendapatan yang relatif tinggi seseorang tidak hanya memikirkan bagaimana upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang layak, tetapi juga menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung dan mengelola sampah rumah tangganya agar tidak berserakan atau tercecer disembarang tempat”

(Hasil wawancara dengan I Wayan Sudiana tanggal 4 Agustus 2002)

Pendapatan merupakan unsur paling penting bagi setiap orang, karena dengan adanya pendapatan yang cukup pasti akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan. Rendahnya pendapatan masyarakat akan berakibat pada pecahnya fokus perhatian untuk menentukan pilihan-pilihan terhadap apa yang harus dilakukan. Respon seseorang yang berpenghasilan rendah cenderung kurang maksimal karena pecahnya fokus perhatian antara keharusan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dengan keharusan melakukan kegiatan lain di luar mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya seperti keharusan mengelola dan menjaga

kebersihan hidup dari dampak negatif lingkungan yang kurang sehat dan kotor sebaliknya seseorang yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi mempunyai kemampuan untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk mengelola lingkungan hidupnya seperti mengelola sampah rumah tangga, bahkan dengan penghasilan yang tinggi seseorang akan mampu membayar atau menggaji orang lain demi menjaga kebersihan lingkungannya (Winardi, 1983).

#### 4.3.3 Tingkat Pengetahuan Kepala Keluarga

Manusia mengetahui sesuatu karena dalam kehidupan sehari-hari senantiasa mengadakan kontak dengan alam lingkungannya, baik fisik maupun non fisik dengan menggunakan alat inderanya. Faktor pengetahuan masyarakat perlu mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan sehingga orientasi melibatkan masyarakat dapat berjalan lancar. Komposisi responden menurut pengetahuan mengenai peraturan tentang sampah dan undang-undang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 8 Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Mengenai Peraturan Tentang Sampah dan Undang-Undang Lingkungan Hidup

| Kategori      | Desa/Kelurahan yang menjadi juara |     |                          |     |                |     | Desa/Kelurahan yang tidak menjadi juara |     |                  |     |             |     | Jml | %   | Jml | %     |
|---------------|-----------------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------|-----|---|-----|------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|
|               | Kelurahan Sumerta                 |     | Desa Padang Sambian Klod |     | Desa Sidakarya |     | Kel. Penatih                            |     | Desa Tegal Harum |     | Desa Panjer |     |     |     |     |       |
|               | Jml                               | %   | Jml                      | %   | Jml            | %   | Jml                                     | %   | Jml              | %   | Jml         | %   |     |     |     |       |
| Tinggi (20)   | 8                                 | 40  | 7                        | 35  | 6              | 30  | 5                                       | 25  | 6                | 30  | 5           | 25  | 21  | 35  | 16  | 26,67 |
| Sedang (6-19) | 9                                 | 45  | 11                       | 55  | 10             | 60  | 4                                       | 55  | 7                | 35  | 6           | 30  | 30  | 50  | 17  | 28,33 |
| Rendah (5)    | 3                                 | 15  | 2                        | 10  | 4              | 20  | 11                                      | 20  | 7                | 35  | 9           | 45  | 9   | 15  | 27  | 45,00 |
|               | 20                                | 100 | 20                       | 100 | 20             | 100 | 20                                      | 100 | 20               | 100 | 20          | 100 | 60  | 100 | 60  | 100   |

Sumber : Data Primer, 2002

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di desa/kelurahan yang menjadi juara memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai peraturan tentang sampah dan Undang-Undang Lingkungan Hidup berada pada kategori sedang dan desa/kelurahan yang tidak menjadi juara sebagian besar responden memiliki pengetahuan mengenai peraturan tentang sampah dan undang-undang lingkungan hidup dalam kategori rendah. Hal ini berarti bahwa tingkat pengetahuan mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan peran serta masyarakat.

Pengetahuan dapat menanamkan pengertian sikap dan cara berpikir serta bertingkah laku mendukung pelestarian lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pengetahuan merupakan khasanah kekayaan mental yang secara langsung dan tidak langsung turut memperkaya kehidupan kita. (Barlian, 2000)

“ Pengetahuan menimbulkan kesadaran untuk melakukan sesuatu yang baik atau buruk bagi kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik kalau kita tidak mengetahui bahayanya.”  
(Hasil wawancara dengan I Wayan Arka pada tanggal 5 Agustus 2002)

Tabel 9 Pengaruh Faktor Pendidikan, Pendapatan dan Pengetahuan Mengenai Peraturan Tentang Sampah dan Undang-Undang Lingkungan Hidup Terhadap Peningkatan Peran Serta Masyarakat

| Variabel    | Unstandarized Coeficient |               | Standarized Coeficient | t Hitung | Signifikansi |
|-------------|--------------------------|---------------|------------------------|----------|--------------|
|             | B                        | Standar Error | Beta                   |          |              |
| Constan     | 9.938                    | .867          |                        | 11.465   | .000         |
| Pendidikan  | .471                     | .179          | .220                   | 2.629    | .010         |
| Pendapatan  | .393                     | .194          | .148                   | 2.025    | .045         |
| Pengetahuan | .299                     | .057          | .444                   | 5.226    | .000         |

Sumber : Data Diolah, 2002

Jika dicermati dari angka-angka tabel 8 diatas dapat ditunjukkan bahwa pendapat dari Barlian (2000) dan pendapat dari Sastropetro (1988) yang menyatakan bahwa peran serta masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pendapatan dan pengetahuan dinyatakan kebenarannya. Hal ini ditunjukkan dari nilai Beta untuk  $X_3$ ,  $X_1$  dan  $X_2$  (0,444, 0,010 dan 0,045) pada signifikansi t kurang dari 5% (0,05) yang bermakna bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh positif dengan menyakinkan pada derajat kepercayaan lebih dari 95% pada Lampiran 4 Tabel 5.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan :

“Ada pengaruh positif tingkat pendidikan, pendapatan dan pengetahuan terhadap peningkatan peran serta masyarakat” terbukti. Namun jika ditinjau dari faktor yang paling berpengaruh terhadap peran serta

masyarakat didaerah penelitian ternyata faktor pengetahuan mengenai peraturan tentang sampah dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisa, dimana besarnya nilai Beta untuk variabel  $X_3 = 0,444$  (dengan nilai  $t = 5,266$  pada signifikansi  $t = 0,000$ ), paling besar dan paling signifikan diantara variabel pengaruh yang lain.

Nilai beta dari ketiga variabel tersebut jika disusun dalam persamaan garis regresi berganda yang bertujuan mengetahui besarnya peranan masing-masing variabel bebas terhadap variasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai berikut :

$$Y = b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$

$$Y = 0,220 x_1 + 0,148 x_2 + 0,444 x_3$$

Berdasarkan persamaan garis regresi linear berganda tersebut terlihat bervariasi sehingga dapat diartikan bahwa setiap variabel bebas mempunyai pengaruh yang bervariasi terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

#### **4.4 Tingkat Kebersihan Lingkungan**

Usaha lain dalam mendorong peran serta masyarakat adalah mengadakan perlombaan kebersihan. Perlombaan tersebut diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali. Untuk memotivasi peserta lomba disediakan hadiah serta penghargaan. Adapun parameter yang digunakan dalam kebersihan lingkungan yaitu kebersihan halaman,

kebersihan jalan, kebersihan selokan dan kebersihan sekitar TPS. Tingkat kebersihan lingkungan di masing-masing desa/kelurahan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 10 Tingkat Kebersihan Lingkungan di Masing-Masing Desa/Kelurahan

| Kategori      | Desa/Kelurahan yang menjadi juara |     |                          |     |                |     | Desa/Kelurahan yang tidak menjadi juara |     |                  |     |             |     | Jml | %     | Jml | %     |
|---------------|-----------------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------|-----|---|-----|------------------|-----|-------------|-----|-----|-------|-----|-------|
|               | Kelurahan Sumerta                 |     | Desa Padang Sambian Klod |     | Desa Sidakarya |     | Kel. Penatih                            |     | Desa Tegal Harum |     | Desa Panjer |     |     |       |     |       |
|               | Jml                               | %   | Jml                      | %   | Jml            | %   | Jml                                     | %   | Jml              | %   | Jml         | %   |     |       |     |       |
| Tinggi (16)   | 10                                | 50  | 14                       | 70  | 10             | 50  | 2                                       | 10  | 5                | 25  | 11          | 55  | 34  | 57,00 | 18  | 30,00 |
| Sedang (5-15) | 9                                 | 45  | 6                        | 30  | 9              | 45  | 11                                      | 55  | 13               | 65  | 9           | 45  | 24  | 40,00 | 33  | 55,00 |
| Rendah (4)    | 1                                 | 5   | -                        | -   | 1              | 5   | 7                                       | 35  | 2                | 10  | -           | -   | 2   | 3,00  | 9   | 15,00 |
|               | 20                                | 100 | 20                       | 100 | 20             | 100 | 20                                      | 100 | 20               | 100 | 20          | 100 | 60  | 100   | 60  | 100   |

Sumber : Data Primer, 2002

Berdasarkan tabel 10 diatas menunjukkan bahwa kondisi lingkungan desa/kelurahan yang menjadi juara lebih bersih jika dibandingkan desa/kelurahan yang tidak menjadi juara. Dimana sebagian besar kelompok responden di desa/kelurahan yang menjadi juara mengatakan kondisi lingkungan dalam keadaan bersih yaitu 34 orang sebesar 57 % dan sebagian besar kelompok responden di desa/kelurahan yang tidak menjadi juara mengatakan bahwa kondisi lingkungannya dalam kategori sedang yaitu 33 orang sebesar 55 %. Hal ini berarti bahwa apabila desa/kelurahan menjadi juara lomba dapat menjadi salah satu faktor penentu terwujudnya peran serta masyarakat yang lebih baik, karena perlombaan dapat menumbuhkan rasa bangga bagi pemenangnya. (Durin, 1985)

Dalam melaksanakan program persampahan untuk mewujudkan kebersihan lingkungan maka diperlukan adanya peran serta pemerintah dan masyarakat. (Slamet, 1994)

#### **4.4.1 Tingkat Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah merupakan salah satu unsur pelayanan yang menjadi tugas pemerintah. Peranan pemerintah dalam pengelolaan sampah meliputi penyediaan tenaga pengumpul sampah, penyediaan alat pengangkut sampah, penyelenggaraan penyuluhan dan membuat peraturan tentang sampah. Tenaga pengumpulan sampah selama ini disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar dengan sistem pengumpulan yang dilakukan 1 kali sehari. Jumlah tenaga pengangkutan sampah yang disediakan yaitu 1 orang untuk masing-masing banjar. Jumlah tenaga pengangkut sampah ini kelihatannya masih kurang karena belum sepenuhnya sampah dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Oleh karena itu perlu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan jalan setiap rumah tangga diorganisir kedalam kelompok-kelompok kecil ditingkat banjar. Dalam setiap kelompok ini terdapat beberapa anggota masyarakat yang bertanggungjawab dalam mengelola sampah dan kelompoknya masing-masing meliputi pengumpulan sampah dari setiap rumah tangga ke tempat penampungan sementara untuk selanjutnya diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Tingkat peranan pemerintah dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 11 Tingkat Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah

| Kategori       | Desa/Kelurahan yang menjadi juara |     |                          |     |                |     | Desa/Kelurahan yang tidak menjadi juara |     |                  |     |             |     | Jml | %     | Jml | %     |
|----------------|-----------------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------|-----|---|-----|------------------|-----|-------------|-----|-----|-------|-----|-------|
|                | Kelurahan Sumerta                 |     | Desa Padang Sambian Klod |     | Desa Sidakarya |     | Kel. Penatih                            |     | Desa Tegal Harum |     | Desa Panjer |     |     |       |     |       |
|                | Jml                               | %   | Jml                      | %   | Jml            | %   | Jml                                     | %   | Jml              | %   | Jml         | %   |     |       |     |       |
| Tinggi (52)    | 2                                 | 10  | 4                        | 20  | 8              | 40  | 3                                       | 15  | 3                | 15  | 7           | 35  | 14  | 24,00 | 13  | 22,00 |
| Sedang (14-51) | 13                                | 65  | 15                       | 75  | 10             | 50  | 8                                       | 40  | 19               | 45  | 7           | 35  | 38  | 63,00 | 24  | 48,00 |
| Rendah (13)    | 5                                 | 25  | 1                        | 5   | 2              | 10  | 9                                       | 15  | 8                | 40  | 6           | 30  | 8   | 13,00 | 23  | 40,00 |
|                | 20                                | 100 | 20                       | 100 | 20             | 100 | 20                                      | 100 | 20               | 100 | 20          | 100 | 60  | 100   | 60  | 100   |

Sumber : Data Primer, 2002

Berdasarkan tabel 11 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok responden berada pada kategori sedang baik di desa/kelurahan yang menjadi juara yaitu sebanyak 38 orang sebesar 63 % maupun di desa/kelurahan yang tidak menjadi juara yaitu sebanyak 24 orang sebesar 48 %. Namun jika dilihat dari jumlah prosentasenya di desa/kelurahan yang menjadi juara prosentasenya lebih besar. Hal ini berarti bahwa peran serta pemerintah berpengaruh terhadap upaya penciptaan kebersihan lingkungan.

Peran serta memiliki kemampuan untuk berperan dalam arti kata yang bersangkutan memiliki ruang lingkup pemikiran dan pengalaman yang sama dengan komunikator. Hal ini berarti bahwa peran serta tidak berjalan secara sendiri sehingga membutuhkan motivasi yaitu kepercayaan terhadap pemerintah yang diwakili oleh pelakunya, atau penyelenggara pemerintah. Kesemua kebijakan dan berbagai upaya yang

telah dilakukan pemerintah pada prinsipnya dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat. (Slamet, 1994)

Dalam pengelolaan sampah rumah tangga pemerintah kota Denpasar berusaha untuk melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan I Gusti Bagus Suparta, SE, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemusnahan Sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Denpasar pada tanggal 6 Agustus 2002.

“ Tanggungjawab kebersihan telah dilimpahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Namun kami menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah belum dapat optimal. Hal ini karena terbentur dengan dana. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga. Usaha yang dilakukan yaitu melaksanakan penyuluhan dan lomba kebersihan.”

#### **4.4.2 Tingkat Peran Serta Masyarakat Mengikuti Program Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah**

Banyak kegiatan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah setempat, yang harus diikuti oleh anggota masyarakat di daerah penelitian. Kegiatan tersebut dapat melalui berbagai media, seperti pertemuan warga, penyuluhan tentang sampah dan kebersihan. Disamping itu kegiatan-kegiatan ini dapat berwujud kerja bakti dalam rangka bersih lingkungan dan membayar retribusi sampah. Kegiatan-kegiatan itu harus diikuti oleh anggota masyarakat. Oleh karenanya dalam mengukur tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah didasarkan pada keikutsertaan setiap responden dalam setiap

kegiatan. Pelaksanaan kerja bakti di desa/kelurahan yang menjadi juara lebih sering dilakukan jika dibandingkan di desa/kelurahan yang tidak menjadi juara. Hal ini dapat dilihat dari komposisi responden yang mengatakan bahwa pelaksanaan kerjabakti yang dilakukan di desa/kelurahan yang menjadi juara berada pada katagori tinggi yaitu sebanyak 65 % dan di desa/kelurahan yang tidak menjadi juara berada pada katagori sedang yaitu sebanyak 50 %.

Sedangkan keikutsertaan masyarakat mengikuti kerjabakti di desa/kelurahan yang menjadi juara dan desa/kelurahan yang tidak menjadi juara ternyata sama yaitu berada pada katagori sedang yaitu sebanyak 57 % di desa/kelurahan yang menjadi juara dan 51% di desa/kelurahan yang tidak menjadi juara.

Selain melalui kerjabakti kebersihan juga dilakukan upaya melalui penyuluhan. Dalam kegiatan penyuluhan ini peran serta masyarakat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Penyuluhan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran pribadi dari masyarakat dalam dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Dalam mengikuti kegiatan penyuluhan peran serta masyarakat sebagian besar berada pada katagori sedang baik di desa/kelurahan yang menjadi juara dan desa/kelurahan yang tidak menjadi juara yaitu sebanyak 79 % di desa/kelurahan yang menjadi juara dan 67 % di desa/kelurahan yang tidak menjadi juara.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah juga dapat dilihat dari kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah karena pembayaran retribusi sampah merupakan aspek pembiayaan yang sangat berperan dalam pengelolaan sampah khususnya untuk menunjang operasionalnya. Peran serta masyarakat dalam pembayaran retribusi sampah di desa/kelurahan yang menjadi juara dan di desa/kelurahan yang tidak menjadi juara berada pada katagori sedang yaitu sebanyak 63 % responden di desa/kelurahan yang menjadi juara dan 60 % di desa/kelurahan yang tidak menjadi juara.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui peningkatan frekwensi kegiatan kerja bakti kebersihan.

Tingkat peran serta masyarakat mengikuti program pemerintah dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 12 Tingkat Peran Serta Masyarakat Mengikuti Program Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah

| Kategori       | Desa/Kelurahan yang menjadi juara |     |                          |     |                |     | Desa/Kelurahan yang tidak menjadi juara |     |                  |     |             |     | Jml | %     | Jml | %     |
|----------------|-----------------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------|-----|---|-----|------------------|-----|-------------|-----|-----|-------|-----|-------|
|                | Kelurahan Sumerta                 |     | Desa Padang Sambian Klod |     | Desa Sidakarya |     | Kel. Penatih                            |     | Desa Tegal Harum |     | Desa Panjer |     |     |       |     |       |
|                | Jml                               | %   | Jml                      | %   | Jml            | %   | Jml                                     | %   | Jml              | %   | Jml         | %   |     |       |     |       |
| Tinggi (44)    | 11                                | 55  | 15                       | 75  | 10             | 50  | 10                                      | 50  | 9                | 45  | 6           | 30  | 36  | 60,00 | 25  | 42,00 |
| Sedang (12-43) | 7                                 | 35  | 4                        | 20  | 10             | 50  | 10                                      | 50  | 7                | 35  | 13          | 65  | 21  | 35,00 | 30  | 50,00 |
| Rendah (11)    | 2                                 | 10  | 1                        | 5   | -              | -   | -                                       | -   | 4                | 20  | 1           | 20  | 3   | 5,00  | 5   | 8,00  |
|                | 20                                | 100 | 20                       | 100 | 20             | 100 | 20                                      | 100 | 20               | 100 | 20          | 100 | 60  | 100   | 60  | 100   |

Sumber : Data Primer, 2002

Dari tabel 12 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok responden di desa/kelurahan yang menjadi juara mempunyai tingkat peran serta untuk mengikuti program pemerintah dalam pengelolaan sampah dalam ketegori tinggi. Sedangkan desa/kelurahan yang tidak menjadi juara berada pada kategori sedang. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat untuk mengikuti program pemerintah dalam pengelolaan sampah berpengaruh terhadap keberhasilan penciptaan kebersihan lingkungan.

Hal ini juga dibuktikan dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat I Made Sada yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2002, beliau mengatakan :

“ Masyarakat cukup antusias mengikuti program yang dicanangkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kebersihan lingkungan”

Alasan perlunya peran serta masyarakat yaitu menekankan pada kesempatan yang diberikan kepada masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap lingkungan untuk dimintai pendapat dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan (Anonimous, 1999). Oleh karenanya dalam mengukur tingkat peran serta masyarakat didasarkan pada keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

### **4.4.3 Tingkat Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah**

#### **Rumah Tangga**

Pengelolaan sampah rumah tangga yang dimaksudkan dalam uraian ini terkait dengan lokasi pembuangan sampah, perlakuan terhadap sampah sebelum dibuang, penyediaan tempat sampah, bahan yang digunakan untuk tempat sampah, tindakan terhadap sampah rumah tangga yang tidak diambil petugas dan tindakan terhadap sampah rumah tangga yang berserakan.

Tempat sampah yang disediakan di masing-masing rumah tangga mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga, guna memudahkan pengangkutannya ke transfer depo atau tempat pembuangan akhir. (Abdul Qadim, HS, 1998).

Dalam upaya penyediaan tempat sampah masyarakat di desa/kelurahan yang menjadi juara dan desa/kelurahan yang tidak menjadi juara berada pada kategori tinggi yaitu juara 75 % di desa/kelurahan yang menjadi juara dan 82 % di desa/kelurahan yang tidak menjadi juara. Hal ini berarti bahwa masyarakat sebagian besar telah menyediakan tempat sampah.

Hal ini juga dibuktikan dalam hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Drs. I Made Aryadi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2002 yang mengatakan :

“Sebagian besar masyarakat telah menyediakan tempat sampah di rumah masing-masing yang kemudian diangkut oleh petugas ke TPS”

Dalam pewadahan sampah perlu dipisahkan antara sampah organik dan anorganik. Tujuan dari pemilahan yaitu untuk memudahkan dalam proses daur ulang. Dimana sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai kompos dan sampah anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan kembali untuk selanjutnya diangkut ke TPA (Anonim, 2002)

Di desa/kelurahan yang menjadi juara dan yang tidak menjadi juara ternyata sebagian besar masyarakat belum memisahkan antara sampah organik dan yang anorganik dimana komposisinya yaitu 90 % di desa/kelurahan yang menjadi juara dan 77 % di desa/kelurahan yang tidak menjadi juara.

Hal ini juga dibuktikan dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Drs.I Ketut Darma yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2002 yang menyatakan :

“ Masyarakat belum banyak yang memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Hal ini terjadi karena masyarakat belum mengetahui manfaat dari pemisahan sampah tersebut. Biasanya masyarakat menyediakan satu tempat sampah di rumah masing-masing untuk semua jenis sampah. “

Dari uraian diatas perlu diupayakan agar masyarakat memisahkan tempat sampah yang organik dan yang anorganik sehingga memudahkan dalam proses daur ulang.

Dalam pengelolaan sampah rumah tangga juga tidak terlepas dari perilaku masyarakat dalam pembuangan sampah. Perilaku masyarakat dalam pembuangan menunjukkan sebagian besar masyarakat baik di desa/kelurahan yang menjadi juara dan desa/kelurahan yang tidak

menjadi juara membuang sampah pada tong sampah untuk selanjutnya diangkut petugas ke tempat pembuangan sementara. Sedangkan sikap masyarakat terhadap sampah yang tidak diambil petugas sebagian besar mendiamkan saja. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penyadaran kepada masyarakat agar mau mengelola sampah rumah tangganya dengan pembelajaran sosial kepada masyarakat melalui sosialisasi penerapan pola 4 R.

Tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 13 Tingkat Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Sampah Rumah Tangga

| Kategori      | Desa/Kelurahan yang menjadi juara |     |                          |     |                |     | Desa/Kelurahan yang tidak menjadi juara |     |                  |     |             |     | Jml | %     | Jml | %     |
|---------------|-----------------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------|-----|---|-----|------------------|-----|-------------|-----|-----|-------|-----|-------|
|               | Kelurahan Sumerta                 |     | Desa Padang Sambian Klod |     | Desa Sidakarya |     | Kel. Penatih                            |     | Desa Tegal Harum |     | Desa Panjer |     |     |       |     |       |
|               | Jml                               | %   | Jml                      | %   | Jml            | %   | Jml                                     | %   | Jml              | %   | Jml         | %   |     |       |     |       |
| Tinggi (24)   | 7                                 | 35  | 5                        | 25  | 2              | 10  | 2                                       | 10  | 8                | 40  | 9           | 80  | 14  | 24,00 | 19  | 32,00 |
| Sedang (6>24) | 11                                | 55  | 13                       | 65  | 17             | 58  | 6                                       | 30  | 6                | 30  | 3           | 15  | 41  | 68,00 | 15  | 25,00 |
| Rendah (6)    | 2                                 | 1   | 2                        | 10  | 1              | 5   | 12                                      | 60  | 6                | 30  | 8           | 5   | 5   | 8,00  | 26  | 43,00 |
|               | 20                                | 100 | 20                       | 100 | 20             | 100 | 20                                      | 100 | 20               | 100 | 20          | 100 | 60  | 100   | 60  | 100   |

Sumber : Data Primer, 2002

Berdasarkan tabel 13 diatas menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di kelurahan yang tidak menjadi juara ternyata lebih tinggi jika dibandingkan di desa/kelurahan yang menjadi juara. Hal ini menunjukkan bahwa adanya

partisipasi masyarakat yang terpaksa hanya karena untuk mengikuti suatu kegiatan seperti misalnya lomba kebersihan.

Hal ini juga diungkapkan dalam hasil wawancara peneliti dengan masing-masing lurah atau kepala desa di daerah penelitian yang dilaksanakan tanggal 12 – 17 Juli 2002. Beliau mengatakan bahwa :

“Apabila diadakan lomba kebersihan masyarakat diharuskan untuk melaksanakan kerja bakti kebersihan dengan harapan agar desa / kelurahan bisa keluar sebagai juara. Apabila desa/kelurahan berhasil meraih juara hal ini akan menjadi suatu kebanggaan “

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat yaitu Drs. I Ketut Gingsih yang dilaksanakan di rumah beliau pada tanggal 28 Juli 2002. Beliau mengatakan :

“ Masyarakat akan malu kalau tidak ikut kerja bakti lebih-lebih desa/kelurahannya akan mengikuti lomba “

Berdasarkan pendapat diatas menunjukkan bahwa peran serta masyarakat ini tergolong peran serta terpaksa. Peran serta terpaksa bila seorang individu melibatkan dirinya dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu dan peran serta terpaksa terjadi karena dipaksa oleh hukum. (Dolseldorp dalam Slamet, 1993)

Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga berpengaruh terhadap keberhasilan upaya penciptaan lingkungan. Namun peran serta masyarakat ini terjadi karena terpaksa.

Untuk melihat pengaruh peranan pemerintah dan masyarakat terhadap penciptaan kebersihan lingkungan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 14 Pengaruh peranan Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Penciptaan Kebersihan Lingkungan

| Variabel                         | Unstandarized Coefficient |               | Standarized Coefficient | t Hitung | Signifikansi |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------|--------------|
|                                  | B                         | Standar Error | Beta                    |          |              |
| Constan                          | 3.350                     | .969          |                         | 3.459    | .000         |
| Peranan Pemerintah ( $X_1$ )     | .148                      | .041          | .296                    | 3.589    | .000         |
| Peran serta Masyarakat ( $X_2$ ) | .541                      | .094          | .476                    | 5.780    | .000         |

Sumber : Data Diolah, 2002

Jika dicermati dari angka-angka tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa pendapat dari Slamet (1994) dan Soedarso (1985) yang menyatakan bahwa program persampahan yang bertujuan untuk menciptakan kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dinyatakan kebenarannya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Beta untuk  $X_1$  dan  $X_2$  (0,296 dan 0,476) pada signifikansi t kurang dari 5% (0,05) yang bermakna bahwa kedua faktor tersebut berpengaruh positif dengan menyakinkan pada derajat kepercayaan lebih dari 95%. Pada Lampiran 4 Tabel 8.

Oleh karena itu hipotesis yang menyatakan bahwa "Ada pengaruh positif peranan pemerintah dan masyarakat terhadap keberhasilan penciptaan kebersihan lingkungan" terbukti.

Namun jika dilihat dari faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan penciptaan kebersihan lingkungan didaerah

penelitian ternyata faktor peran serta masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisa, dimana besarnya nilai Beta untuk variabel  $X_2 = 0,476$  dengan nilai  $t = 5,780$  lebih besar dan lebih signifikan dibandingkan dengan peranan pemerintah.

Nilai beta dari variabel peran serta masyarakat dan peranan pemerintah jika disusun dalam persamaan garis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui besarnya peranan masing-masing variabel bebas terhadap variasi di dalam upaya menciptakan kebersihan lingkungan di kota Denpasar sebagai berikut :

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 0,296 \cdot X_1 + 0,476 \cdot X_2$$

Berdasarkan persamaan garis regresi linear berganda tersebut terlihat bervariasi sehingga dapat diartikan bahwa setiap variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap upaya penciptaan kebersihan lingkungan.

Kebersihan kota bergantung pada sistem pengelolaan sampah yang dilakukan, sehingga pengaruh tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sangat menentukan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, perlu kebijaksanaan, mendorong peran serta masyarakat (Iswanto, 1981). Peran serta ini juga sangat diperlukan mengingat kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan masih sangat terbatas.

#### 4.5 Analisis Kondisi

Untuk menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di masyarakat dilakukan dengan analisa SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Treats) yaitu :

Kekuatan :

- Diterbitkan Perda No. 3 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.
- Adanya wadah organisasi masyarakat sehingga memudahkan koordinasi dan penyampaian informasi.

Kelemahan :

- Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga
- Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan tentang sampah dan Undang-Undang Lingkungan Hidup
- Penyediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah masih kurang
- Biaya yang dianggarkan oleh pemerintah dalam program persampahan masih kurang

Peluang :

- Tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat sudah cukup baik
- Adanya kemauan masyarakat untuk melakukan perbaikan
- Program pemerintah untuk menjadikan kota Denpasar sebagai kota yang berbudaya hidup bersih

Ancaman :

- Pertumbuhan penduduk kota Denpasar terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga berpengaruh terhadap peningkatan volume sampah
- Pola hidup masyarakat perkotaan yang konsumtif

Berdasarkan uraian diatas dapat dibuatkan suatu matrik analisa SWOT sebagai berikut :

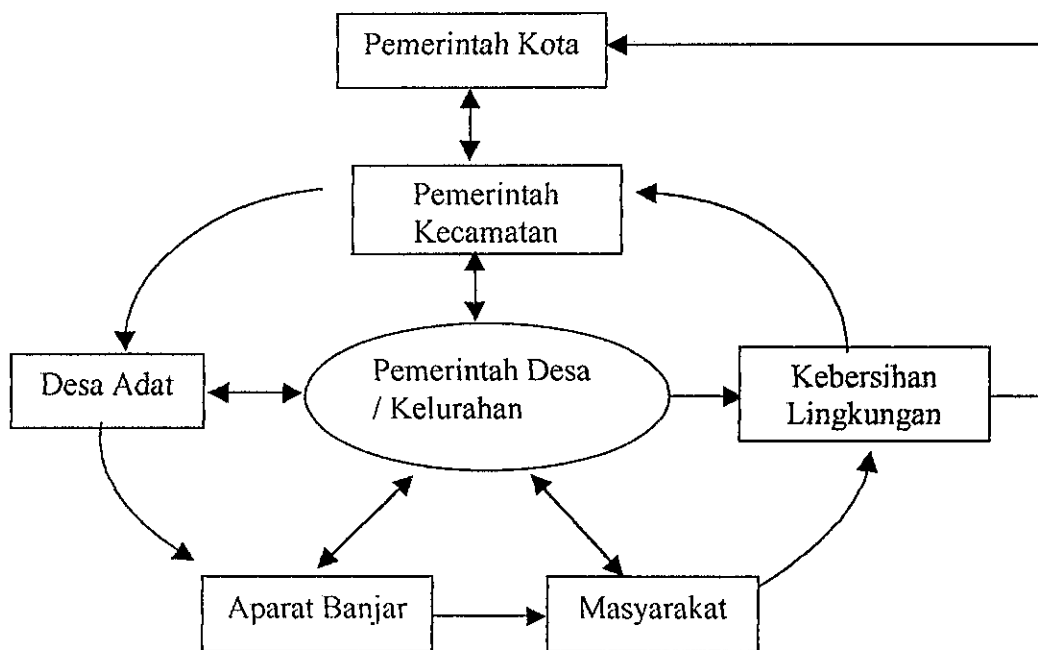
| Faktor Eksternal<br>/ Faktor Internal | Peluang  | Ancaman  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Kekuatan</b>                       | <b>Keunggulan komparatif</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kemauan masyarakat untuk melakukan perbaikan</li> <li>- Adanya program pemerintah untuk menjadikan kota Denpasar sebagai kota yang berbudaya hidup bersih.</li> </ul> | <b>Mobilisasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan manajemen persampahan</li> <li>- Menerapkan pola 4R</li> </ul>   |
| <b>Ancaman</b>                        | <b>Investasi/Divestasi</b> <p>Pembelajaran sosial kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang penerapan manajemen sampah dan penerapan pola 4 R</p>  | <b>Pengendalian</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melibatkan desa adat</li> <li>- Meningkatkan peran serta keluarga</li> <li>- Upaya terpadu dari pemerintah kota sampai pemerintah desa/kelurahan</li> </ul> |

Gambar 3  
Matrik Analisa SWOT

Berdasarkan analisa SWOT diatas dapat digunakan sebagai pedoman untuk langkah perencanaan selanjutnya. Perencanaan merupakan suatu proses yang dipersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan di masa depan (Dror, 1964) dalam Hadi (2001).

#### 4.6 Model Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Denpasar

Untuk menghasilkan kerangka kerja yang dibutuhkan bagi perumusan berbagai kebijakan yang menyangkut masalah kependudukan, kualitas hidup dan lingkungan dilaksanakan dengan sebuah pendekatan sistem yang menyangkut semua aspek dan saling terkait satu sama lain (Soerjani, 1999). Untuk mewujudkan kebersihan lingkungan di kota Denpasar dapat dilaksanakan sesuai model di bawah ini :



Gambar 4  
Model Upaya Pengelolaan Sampah  
Rumah Tangga di Kota Denpasar

Berdasarkan model diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peranan Pemerintah Kota/Kecamatan

Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga bekerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan.

2. Pemerintah Desa/Kelurahan berperan sebagai fasilitator antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya untuk pengelolaan sampah rumah tangga, tentunya melakukan koordinasi dengan desa adat.

3. Desa Adat berperan untuk melaksanakan pengawasan pemeliharaan dan peningkatan disiplin masyarakat dan melaksanakan koordinasi dengan desa/kelurahan.

4. Setiap rumah tangga diorganisasi kedalam kelompok-kelompok kecil di tingkat banjar. Dalam setiap kelompok ini terdapat beberapa anggota masyarakat yang bertanggung jawab dalam mengelola sampah dan kelompoknya masing-masing meliputi pengumpulan sampah dari setiap rumah tangga ke tempat penampungan sementara, untuk selanjutnya diangkut ke TPA.

5. Masyarakat berperan melaksanakan kebersihan ditingkat keluarga melalui pengelolaan sampah rumah tangga untuk menciptakan kebersihan lingkungan secara integral.

Gazalba (1989) menyatakan bahwa pendidikan pertama dan utama warga masyarakat didapat dari lingkungan keluarga. Dalam pendidikan rumah tanggalah dimulai sosialisasi dan pembentukan calon-calon anggota masyarakat. Pendidikan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging membentuk tabiat membentuk sikap mental. Sikap mental ini akan menentukan kepribadian, kepribadian akan melahirkan kemauan-kemauan menggerakkan laku perbuatan sejenis dengan apa yang dididik. Dengan demikian sikap mental, jenis kemauan dan laku perbuatan warga masyarakat dipersiapkan oleh pendidikan keluarga.

Dengan demikian, lingkungan keluarga merupakan media yang sesuai bagi upaya penanaman etika lingkungan, karena di dalamnya secara rutin terjadi proses sosialisasi etika dan moralitas kehidupan. Sosialisasi dan proses kebersihan lingkungan perlu diupayakan terus sehingga muncul kesadaran pribadi.

Pada gilirannya, kesadaran tersebut akan melahirkan rasa tanggungjawab dan pengabdian terhadap keberadaan dan kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian integral dari kehidupan manusia.

Dalam teori perencanaan ini merupakan perencanaan partisipatori yang bertujuan untuk mencapai proses yang adil dari pembangunan dengan memberdayakan masyarakat dan menuntut adanya keikutsertaan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka. (Hadi, 2001)

#### **4.7 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Denpasar**

Dinamika kehidupan manusia yang semakin maju berdampak pada perubahan pola perilaku dan tingkat kesadarannya terhadap lingkungan di sekitarnya. Bagi masyarakat yang berpendidikan, memiliki strata sosial ekonomi dan pengetahuan yang luas, sampah rumah tangga merupakan masalah yang harus diatasi. Sementara bagi masyarakat yang pendidikan sosial ekonomi dan pengetahuannya masih kurang sampah rumah tangga bukanlah merupakan masalah serius yang harus ditangani.

Peran serta masyarakat untuk mengikuti program pemerintah di kota Denpasar secara umum sudah cukup baik, namun peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga masih perlu ditingkatkan.

Hal ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat yang dilakukan terkesan dipaksakan bukan tumbuh dari kesadaran sendiri untuk mengelola sampah rumah tangganya. Berdasarkan kenyataan tersebut Pemerintah Daerah Kota Denpasar perlu mengambil langkah-langkah antisipatif baru untuk menyusun strategi kedepan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam mengelola sampah rumah tangga.

Kehadiran aparat Pemda Kota Denpasar dalam wujud produk-produk hukum dan implementasi produk-produk hukum di lapangan masih tetap relevan dan dibutuhkan mengingat homogenitas struktur

sosial masyarakat dan memperhatikan perkembangan sampah rumah tangga yang terus meningkat dan semakin sulit untuk dikelola.

Pemerintah harus melakukan perbaikan-perbaikan secara internal dengan melakukan perbaikan format pelayanan melalui peningkatan pelayanan tim pasukan kuning yang telah dibentuk, perbaikan sarana dan prasarana, meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan memberikan kesempatan tugas belajar agar betul-betul memahami dan dapat melaksanakan bidang tugasnya dengan baik.

Dalam pengelolaan sampah rumah tangga perlu dihindari masyarakat tidak sekedar ikut karena keikutsertaan ini bersifat semu. Yang harus diupayakan adalah tumbuhnya kesadaran pribadi masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangganya dengan tujuan permasalahan sampah dapat diatasi atau dikelola dengan baik sehingga kebersihan lingkungan dapat terjaga.

Faktor tingkat pengetahuan masyarakat terbukti memberikan kontribusi yang besar terhadap peran serta masyarakat. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat secara luas perlu terus dilakukan secara intensif sehingga betul-betul mampu membangkitkan kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum secara intensif di tingkat banjar.

Dalam pelaksanaan pengawasan pemeliharaan dan peningkatan disiplin masyarakat perlu melibatkan desa adat dengan menerapkan awig-awig/peraturan desa adat.

Mengingat kemampuan pemerintah sangat terbatas maka perlu diupayakan agar sistem pengelolaan sampah dilakukan secara swakelola oleh masing-masing desa/kelurahan.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan meningkatkan peran serta keluarga untuk menerapkan pola 4 R (Reduce, Replace, Reuse dan Recycle).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran, baik untuk keperluan pengambilan keputusan ataupun untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang relevan dengan penelitian ini.

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **1. Pemerintah**

Secara umum peranan pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga berada pada kategori sedang. Hal ini berarti bahwa peranan pemerintah belum optimal. Sedangkan peran serta masyarakat mengikuti program pemerintah dalam pengelolaan sampah sudah cukup baik dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga masih perlu ditingkatkan. Peranan pemerintah dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga berpengaruh positif terhadap upaya penciptaan kebersihan lingkungan. Namun yang lebih berpengaruh adalah peran serta masyarakat.

##### **2. Masyarakat**

Tingkat pendidikan, pendapatan dan pengetahuan masyarakat mengenai peraturan tentang sampah dan Undang-Undang Lingkungan Hidup secara bersama-sama maupun secara parsial mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

rumah tangga. Faktor yang paling berpengaruh terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga secara berurutan dari yang tertinggi sampai yang terendah pengaruhnya adalah pengetahuan masyarakat mengenai peraturan sampah dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Yang kedua adalah tingkat pendidikan masyarakat dan yang terendah adalah tingkat pendapatan masyarakat.

## 5.2 Saran

### 1. Pemerintah

- Faktor tingkat pengetahuan masyarakat terbukti memberikan kontribusi yang besar terhadap peran serta masyarakat. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat secara luas perlu terus dilakukan secara intensif sehingga betul-betul mampu membangkitkan kesadaran murni bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah atau aparatnya melalui sosialisasi penerapan pola 4 R di masyarakat.
- Dalam pelaksanaan pengawasan pemeliharaan dan peningkatan disiplin masyarakat perlu melibatkan desa adat.
- Mengingat kemampuan pemerintah sangat terbatas maka perlu diupayakan agar sistem pengelolaan sampah dilakukan secara swakelola oleh masing-masing desa/kelurahan.
- Pemerintah harus melakukan perbaikan secara internal dengan melakukan perbaikan format pelayanan, perbaikan sarana dan

prasarana, meningkatkan sumberdaya manusia agar betul-betul memahami dan dapat melaksanakan bidang tugasnya dengan baik.

## 2. Masyarakat

- Dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan meningkatkan peran serta keluarga untuk menerapkan pola 4 R (Reduce, Replace, Reuse dan Recycle).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachaman, 1976. *Transmigrasi dan Penduduk Setempat di Aceh*, Laporan Penelitian Proyek Research Departemen P dan K
- Anonim, 2002, *Daur Ulang dan Sistem Manajemen Persampahan*, [www.inovasiipemda.com/bagpro/kota\\_b\\_lampung.htm](http://www.inovasiipemda.com/bagpro/kota_b_lampung.htm), 27 September 2002
- Anonimous, 1999. *Usulan Teknis Pemberdayaan Masyarakat Pemukiman Kumuh Nelayan Pantura Jawa Tengah*. Jurusan Planologi Pengembangan Wilayah Kota Universitas Diponegoro, Semarang.
- Apriadji, Wied Harry, 2000. *Memproses Sampah*. Penebar Swadaya, Jakarta
- Aswar.S, 1998. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Liberty, Yogyakarta
- Bali Post, 2001. *Seputar Pembangunan Sarbagita*, 21 September 2001
- Departemen Kesehatan, 1987. *Pembuangan Sampah. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan*
- Djarmiko, dkk, 2000. *Pendayagunaan Industrial Waste Management*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Donald R. Cooper, 1996. *Metode Penelitian Bisnis*, Erlangga, Surabaya
- Durin, HB, 1983. *Peraturan Perundang-Undangan Sampah di Padang dan Implementasinya*. Dalam Armen, 1987. *Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Sampah di Kotamadia Padang*. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Eri Barlian, 2000. *Lingkungan Dan Pembangunan : Jurnal Pusat Studi Lingkungan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Vol 20, Nomor 4; 2000*
- Fredy Rangkuti, 2001. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Gazalba.S, 1994. *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, Bulan Bintang, Jakarta
- Hadi, Sudharto. P, 1995. *Aspek Sosial Amdal*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

- \_\_\_\_\_, 2000. *Manusia Dan Lingkungan*. Universitas Diponegoro, Semarang
- \_\_\_\_\_, 2001. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hartoko.D, 1985. *Memamusiakan Manusia Muda, Tinjauan Pendidikan Humaniora*, Kanisius Yogyakarta
- H.P Arimbi dan Santoso, Mas Achmad, 1993. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Walhi, Jakarta
- Imam Ghozali, 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro, Semarang
- Ircham, 1992. *Kesehatan Lingkungan, Sanitasi Perkotaan dan Pedesaan*. Dian Nusantara, Yogyakarta
- Iswanto, H, 1981. *Pengelolaan Masalah Sampah di Kotamadia Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Keating, 1994. *Bumi Lestari Menuju Abad 21, Agenda 21 dan Hasil KTT Bumi*, Konphalindo, Jakarta
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1990. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Margono, 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nawawi, Hadari, 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. CV. Mandar Jaya, Bandung
- Neraca Kualitas Lingkungan Hidup*, 2000. Pemerintah Daerah Kota Denpasar
- Outerbridge, 1991. *Limbah Padat Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo. M. D, 1998. *Pesantren dan Pembaharuan*, LP<sub>3</sub>ES, Jakarta
- Said H.M, 1989. *Ilmu Pendidikan*. Alumni, Bandung
- Sarudji, Didik, 1986. *Pengelolaan Sampah. Instalasi*. Penerbitan Akademi Penilik Kesehatan Surabaya

- Sastropoetro, S, 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Slamet, Juli Soemirat, 1994. *Kesehatan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Slamet, Y, 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press, Surakarta
- Soerjani, Mohammad, 1999. *Kepedulian Masa Depan*. Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan, Jakarta
- Sri Mawati, 1998. *Upaya Penciptaan Lingkungan yang Sehat Melalui Peran Serta Keluarga Dalam Penanggulangan Sampah*. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Sudarso, 1985. *Pembuangan Sampah*. SPPH Surabaya, Proyek Pengembangan Pendidikan Tenaga Sanitasi Pusat Departemen Kesehatan RI
- Sukarni, Mariyati, 1994. *Kesehatan Keluarga dan Lingkungan*. Kanisius, Yogyakarta
- Swif. D.F, 1989. *Sosiologi Pendidikan, Perspektif Pendahuluan yang Analitis*, Bharata, Jakarta
- Syafrudin, Priyambada, 2001. *Pengelolaan Limbah Padat*. Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tandjung, S.DJ. *Pencemaran Lingkungan*, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Winardi, 1983. *Pembangunan Pemerataan*. LP3ES, Jakarta